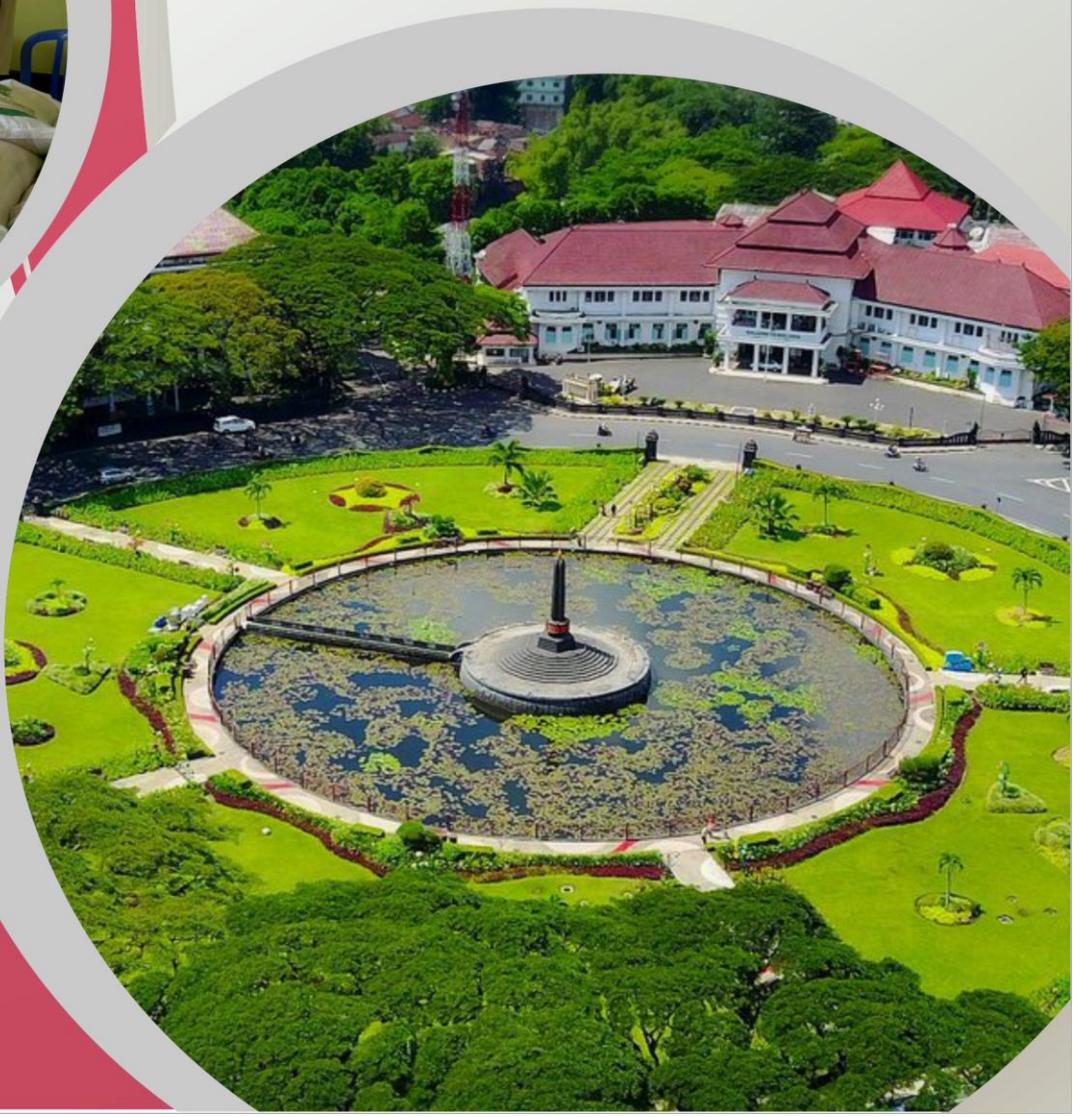




DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



20
23

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-V pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban dan merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja oleh seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Malang, 13 Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



DONNY SANDITO W, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770724 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Perencanaan Kinerja.....	10
1. Tujuan dan Sasaran.....	11
2. Strategi dan Arah Kebijakan	14
B. Indikator Kinerja Utama.....	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
D. Standar Penilaian Kinerja	22
BAB III	21
AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	23
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023	30
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.	36
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).	42
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.	43
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	48
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	53
B. Realisasi Anggaran.....	73
BAB IV.....	80
PENUTUP	80
▪ Pencapaian Tujuan 1.....	80
• Pencapaian Sasaran 1.....	81
▪ Pencapaian Tujuan 2.....	82
• Pencapaian Sasaran 2.....	83

- Pencapaian Tujuan 3..... 84
- Pencapaian Sasaran 3..... 84
- Pencapaian Sasaran 4..... 85
- LAMPIRAN.....87**



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas: melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebagai sebuah Organisasi Pembinaan, Pemberdayaan dan pelaksanaan urusan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, haruslah memiliki kemampuan dalam memberdayakan perempuan, melaksanakan perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial yang ada dibawah koordinasinya. Untuk menciptakan suasana yang kondusif Inovatif terhadap proses pelaksanaan kegiatan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Pelaksanaan Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- c. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial;
- d. Pemberdayaan Sosial;
- e. Penanganan Fakir Miskin;
- f. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik Hukum dan Kualitas Keluarga;
- g. Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data dan Informasi Gender dan Anak;
- h. Pemenuhan Hak Anak Terkait Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Pengasuhan, Keluarga dan Lingkungan, Kesehatan dan Kesejahteraan Serta Pendidikan, Kreativitas dan Kegiatan Budaya;
- i. Pencegahan dan Penangan Kekerasan Terhadap Perempuan didalam Rumah Tangga, dibidang Ketenagakerjaan, dan Situasi Darurat dan Kondisi Khusus serta dari Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- j. Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- k. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berada dalam Penguasaannya;
- l. Pelaksanaan Administrasi di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- n. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

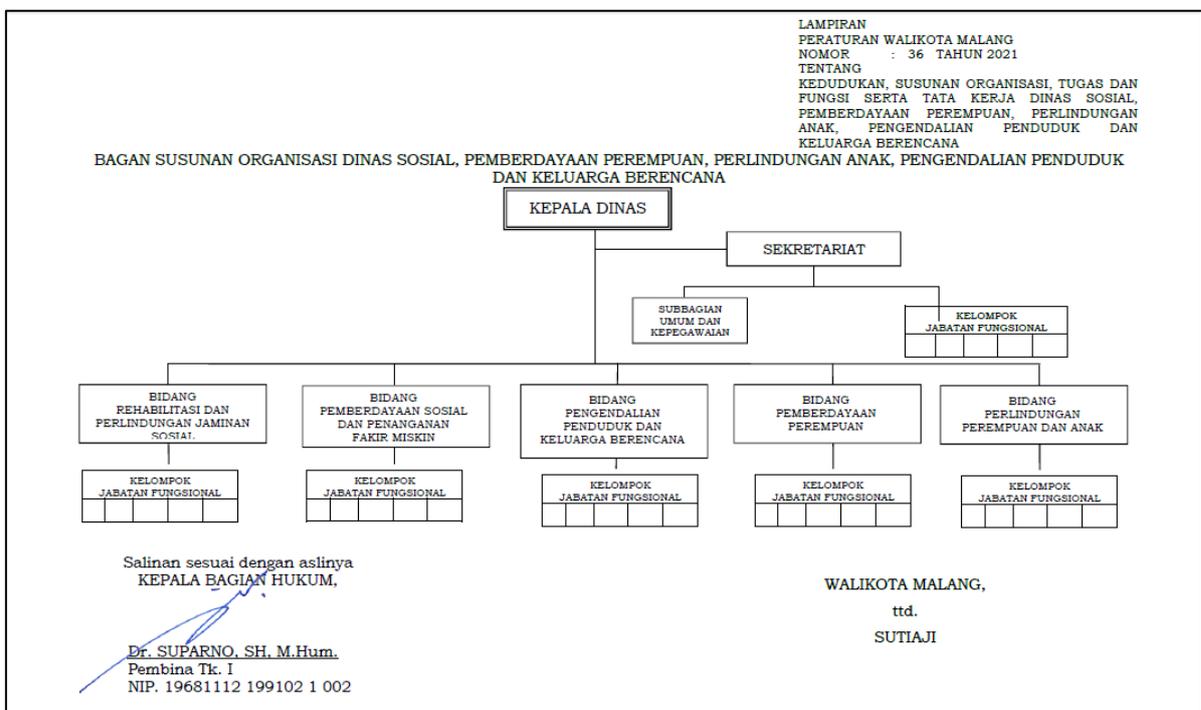
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi terdiri dari:

Susunan Organisasi Dinas:

- a. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinsos P3AP2KB Kota Malang



Sumber : Perwal Kota Malang Nomor 36 Tahun 2021

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Sumber : Perwal Kota Malang Nomor 36 Tahun 2023

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan khususnya tersedianya data terpilah yang *update* dan valid untuk data PMKS, kependudukan, anak, dan perempuan.
2. Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.
3. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.
4. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan belum maksimal.
5. Masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
6. Pelaksanaan penanganan perlindungan anak dan perempuan belum optimal.
7. Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belum Optimal.
8. Masih adanya kasus – kasus anak seperti Anak berhadapan dengan Hukum, anak terlantar, perkawinan usia dini.
9. Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki
10. Kurang optimalnya kenaikan contraceptive prevalence rate (CPR) atau cakupan KB Aktif.
11. Belum optimalnya upaya pendewasaan usia perkawinan.
12. Kurangnya Media tentang pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
13. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi keluarga khususnya melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
14. Belum optimalnya pengembangan BKB, BKL, BKR.
15. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.
16. Kesenjangan/Gap yang berpengaruh pada gaya hidup/orientasi.
17. Migrasi penduduk yang semakin meningkat dan tidak tersedia data sehingga sulit untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk
18. Belum optimalnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
19. Penanganan masalah pengangguran/kemiskinan.
20. Kualitas sumber daya manusia yang belum maksimal sesuai dengan bidang tugas pelayanan sosial.
21. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum maksimal.

22. Sarana tempat penampungan klien yang sudah tersedia masih kurang memadai yaitu Penampungan TWK Sukun.
23. Masih rendahnya tingkat kesadaran/motivasi diri PMKS.
24. Belum adanya pendampingan yang intens bagi ex.gepeng dan fakir miskin yang telah mendapat pelatihan ketrampilan baik pendampingantenaga maupun permodalan.
25. Belum tercukupi secara merata kebutuhan dasar bagi PMKS.
26. Program bantuan pemerintah pusat belum tepat sasaran.
27. Masih tingginya jumlah PMKS.
28. Belum optimalnya kemitraan lintas sektoral.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Kesetaraan gender yang berpihak pada masyarakat rentan dan gender;
2. Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan belum maksimal;
3. Belum terintegrasinya sistem informasi perlindungan perempuan dan anak;
4. Masih adanya kasus anak seperti Anak berhadapan dengan Hukum;
5. Masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. Belum terpenuhinya pemenuhan hak anak (kelembagaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan, perlindungan khusus);
7. Belum optimalnya Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus(ABK);
8. Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki;
9. Keinginan PUS untuk ber KB rendah (unmet need tinggi);
10. Belum tersusunnya database pembangunan keluarga yang valid;

11. Keterbatasan ibu dalam mengatasi permasalahan ekonomi keluarga;
12. Belum optimalnya upaya pendewasaan usia perkawinan;
13. Keterbatasan personil/tenaga kerja kesejahteraan sosial;
14. Kualitas sumber daya manusia yang belum maksimal sesuai dengan bidang tugas pelayanan sosial;
15. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum maksimal;
16. Masih rendahnya tingkat kesadaran/motivasi diri PMKS;
17. Belum tercukupinya secara merata kebutuhan dasar bagi PMKS;
18. Masih tingginya jumlah PMKS;
19. Belum optimalnya kemitraan lintas sektoral.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kota Malang periode 2018-2023;

7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Malang Provinsi Jawa Timur 179-5/2019);
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja DSP3AP2KB;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023;
10. Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, Susunan Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan terdiri dari:

- A. Perencanaan Kinerja terdiri atas :
 1. Tujuan dan Sasaran
 2. Strategi dan Arah Kebijakan
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- D. Standar Penilaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian dari :

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Realisasi dan capaian kinerja tahun 2018-2023;
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis;
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja).

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Matrik Renstra
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Ringkasan Pengukuran Kinerja yang sesuai IKU Tahun 2023
4. Lampiran lainnya (Penghargaan)
5. LHE SAKIP 2023
6. SPM



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2023 diakomodir dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang. Dimana dokumen rencana strategis tersebut merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dibuat pada masa jabatannya, sehingga dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan maksimal.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

Tahun 2018-2023 merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dan stakeholder.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2018-2023 tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang telah menyesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah yang telah tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang. Dimana visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Malang.

Visi Pemerintah Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah:

“Kota Malang Bermartabat”

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Istilah “martabat” menunjuk pada tingkat harkat kemanusiaan dan sebuah nilai harga diri. Sehingga, dengan visi “Kota Malang Bermartabat” diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tantangan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT). Sedangkan

untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Malang Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga
2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan
3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender
4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada Misi ke-1, ke-3 dan ke-4. Tujuannya mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis strategis yang telah dijabarkan sebelumnya. Sedangkan sasarannya adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh dinas dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang ditentukan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Sosial, P3AP2KB

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas perlindungan	Meningkatnya aksesibilitas	Persentase (%) Penurunan PMKS	2,23%	5%	5%	5%	5%	5%

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	6	7	8
ngan social bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan /mandiri	4,38%	15,10 %	15,11 %	15,46 %	15,15%	15,37 %
		Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina	71,48 %	73,19 %	79,19 %	78,40 %	79,52%	79,94 %
		Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	38,88 %	38,88 %	61,98 %	63,52 %	65,06%	66,61 %
Terwujudnya Kesetaraan Gender dan perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindakan Kekerasan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak	IPG	96,76	96,8	96,9	95	95,5	96
		IDG	71,05	74,87	74,97	78,3	78,6	79
		Ratio KDRT	1:3175	1:3171	1:3398	1:27000	1:27250	1:27500
Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas	Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,63	0,63	0,62	0,65	0,64	0,63
		TRF per WUS (15 s/d 49 tahun)	1,7	1,65	1,67	1,7	1,7	1,7
	Meningkatnya kinerja pelayanan	Nilai SAKIP	75,03	79	80	80,7	80,75	80,8

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	6	7	8
	perangkat daerah							

Sumber : *Review Renstra Dinas 2018-2022*

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan dipertegas dengan adanya arah kebijakan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang memiliki 17 strategi dan 33 arah kebijakan. Kesenambungan perumusan strategi dan arah kebijakan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran renstra . Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dan yang telah menyesuaikan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang ada dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Malang dapat dijabarkan melalui tabel berikut.

Tabel 2. 2
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial, P3AP2KB

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	2	3	
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri	Menjamin masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan fasilitas dukungan pemberian kecukupan kebutuhan dasar, akses pelayanan kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	2	3	
		Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial	Kebijakan Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan ketrampilan PMKS
			Fasilitasi Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan
			Menyelenggarakan perlindungan dan bantuan hukum/advokasi bidang sosial
			Meningkatkan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan
			Melakukan Verifikasi dan validasi penduduk miskin
		Penyelenggaraan rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi PMKS agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan bermartabat	Melaksanakan penampungan, pengiriman dan rehabilitasi/pemberian pembinaan/pelatihan ketrampilan bagi Anak Jalanan, ex, Gelandangan, Pengemis,,Korban NAPZA/ODHA
			Peningkatan koordinasi lintas sektoral
			Peningkatan sarana dan prasarana pada TWK sukun, Pondok Lansia dan Liponsos Camp Assesment
			Melakukan Pendampingan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
		Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pemeliharaan dan Penatan TMP Suropati dan monumen TRIP
			Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keprintisan dan kesetiakawanan sosial
Terwujudnya Kesetaraan Gender dan perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak	Optimalisasi P2TP2A
		Meningkatkan kualitas anak dan peran perempuan	Penyediaan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan anak secara lengkap dan kontinyu
		Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Sosialisasi peraturan perundang –undangan dan kebijakan terkait KtP dan anak kepada semua pemangku kepentingan
		Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Advokasi dan sosialisasi pemerintah ,masyarakat dan dunia usaha serta media masa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	2	3	
			Mewujudkan kelurahan ramah anak, termasuk sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, partisipasi anak serta lingkungan dan ruang bermain ramah anak
			Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak melalui penguatan dan harmonisasi perundangundangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya
			Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan
			Peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif anak
		Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
			Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan
			Penguatan Tim driver PUG di daerah
Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas	Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Revitalisasi keluarga berencana	Meningkatkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai , akurat dan tepat waktu	Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi kependudukan yang akurat dan tepat waktu
		Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan KR	Meningkatkan pemahaman keluarga / masyarakat tentang norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera
		Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatkan kerjasama /Kemitraan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di bidang pelayanan KB

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	2	3	
			Meningkatkan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien dan menjamin ketersediaan alat/obat kontrasepsi dengan prioritas keluarga miskin.
			Meningkatkan sosialisasi , pelatihan, pembinaan tentang pelaporan dan pencatatan yang akurat
		Pengembangan model operasional BKB – Posyandu-PAUD	Meningkatkan pemahaman keluarga /masyarakat tentang pengumpulan dan pengembangan bahan informasi pengasuhan dan tumbuh kembang anak
		Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Mengembangkan cakupan kualitas kelompok Bina Keluarga dan mewujudkan keluarga sejahtera
		Memasyarakatkan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja	Mengembangkan kebijakan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
		Pengembangan pusat pusat pelayanan informasi dan konseling bagi BKB, BKR dan BKL	Meningkatkan Konseling,komunikasi, informasi dan edukasi serta advokasi bagi masyarakat,keluarga dan remaja

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan telah ditetapkan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama . Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Sosial, P3AP2KB

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target per Tahun (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase (%) Penurunan PMKS	5%	5%	5%	5%	5%
	Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina	73,19%	79,19%	78,40%	79,52%	79,94%
		Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri	16.10%	15.11%	15.46%	15.15%	15.37%
		Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	38.88%	61.98%	63.52%	65.06%	66.61%
2	Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	IPG	96,76	96,8	95	95,5	96
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Ratio KDRT	1:3171	1:3398	1:27000	1:27250	1:27500
		IDG	74,87	74,97	78,3	78,6	79
3	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,63	0,62	0,65	0,64	0,63

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target per Tahun (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	1,65	1,67	1,7	1,7	1,7
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	79	80	80,7	80,75	80,8

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, P3AP2KB

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah dari anggaran yang terbatas, sehingga diharapkan dalam mengelola program dan kegiatan bisa maksimal sesuai dengan target kinerja yang telah

ditentukan. Penyusunan Perjanjian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 mengacu pada Dokumen Renstra Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Dengan sasaran, indikator, dan target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri	15,37	Program Pemberdayaan Sosial	3.905.149.767,00
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	371.772.924,00
	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina	79,94	Program Rehabilitasi Sosial	16.940.991.800,00
			Program Penanganan Bencana	282.165.000,00
Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	66,61	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.094.802.300,00	

Tabel 2.4.2

Tujuan 2 : Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan
Dengan sasaran, indikator, dan target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak	IDG	79	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	536.868.000,00
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.805.208.000,00
	Ratio KDRT	1 : 27500	Program Perlindungan Perempuan	477.010.000,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
			Program Perlindungan Khusus Anak	1.061.185.412,00

Tabel 2.4.3

Tujuan 3 : Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas

Dengan sasaran, indikator, dan target sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	1,7	Program Pengendalian Penduduk	394.180.751,00
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.675.353.712,00
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.963.133.537,00
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	80,8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.439.173.008,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2023

D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2023 maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil

$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil
----------	--------------------------------

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kota Malang. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2023.



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Malang.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2023 juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi :

- a. Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan
- b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak
- c. Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
- d. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

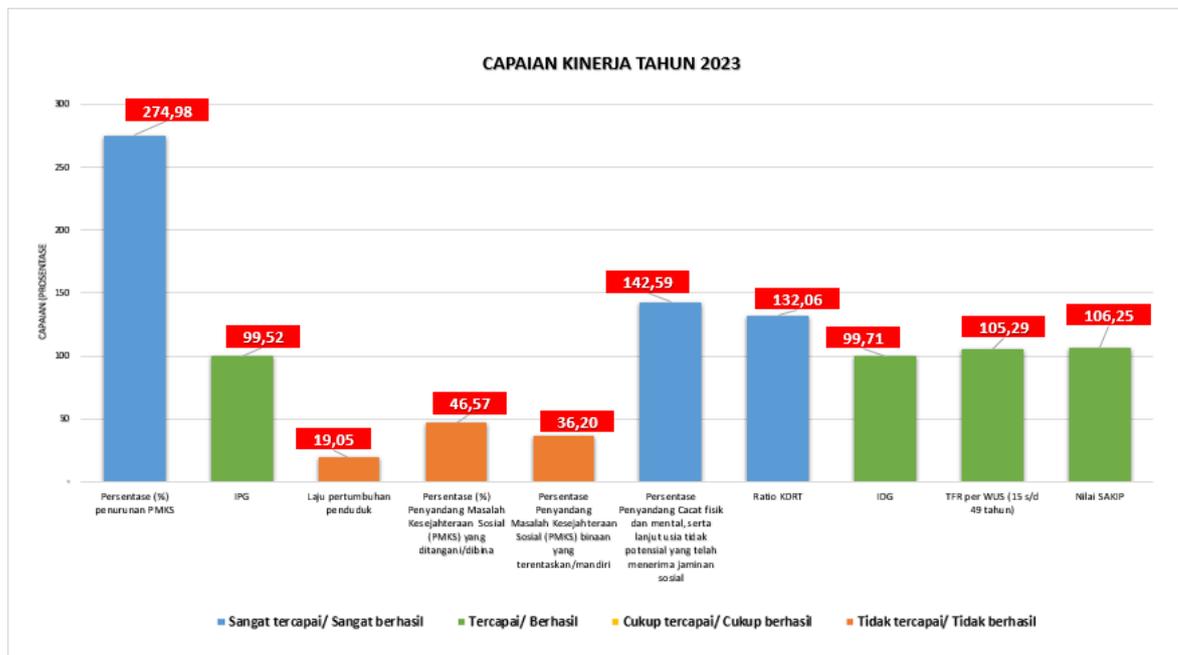
Tabel 3. 1

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
		2023	2023	2023	
1	2	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan PMKS	5%	13,75%	274,98%	Perlu adanya optimalisasi dan sinergitas antara PD dan lintas sektoral dalam penanganan kemiskinan
Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan bagi PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/man diri	15,37%	5,56%	36,20%	Kurangnya kesadaran masyarakat yang sudah mampu untuk menyatakan diri tidak layak
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina	79,94%	37,23%	46,57%	Kurangnya perluasan pembinaan kepada PMKS
	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	66,61%	94,98%	142,59%	Perlu dipertahankan

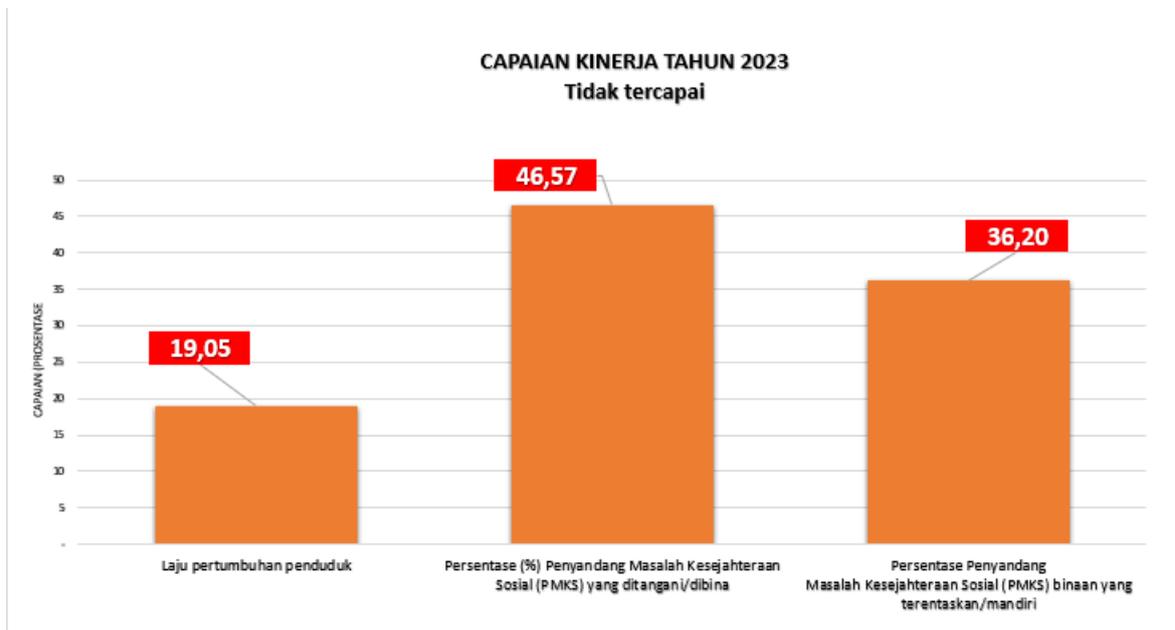
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
		2023	2023	2023	
1	2	4	5	6	7
Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	IPG	96%	95,54%	99.52%	Kurangnya peran aktif organisasi perempuan dan pemberdayaan kualitas keluarga perempuan
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak	IDG	79%	78,77	99,71%	Kurangnya partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial
	Ratio KDRT	1 :27500	1 : 36317	132,06%	Perlu dipertahankan
Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.63	0.12	19.05%	Perlu disinergikan antara pertumbuhan penduduk tiap tahun dengan persentase target renstra tiap tahun
Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	1,7	1,79	105,29%	Perlu dipertahankan
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	80,80	85,85	106,25%	Perlu dipertahankan
	Rata-rata capaian			106,22%	

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata capaian keberhasilan sebesar 106,22% pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 73,67%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perluasan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja dan upaya perbaikan kinerja di tahun selanjutnya.



Gambar 3. 1 Capaian Kinerja Dinas Sosial P3AP2KB Tahun 2023

Grafik ini menunjukkan capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2023 cukup baik dengan beberapa indikator yang melebihi target. Capaian kinerja yang menonjol antara lain adalah Persentase penurunan PMKS, Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, dan Ratio KDRT. Namun, masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target. Berikut merupakan rincian hasil capaian indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2023.



Gambar 3. 2 Capaian Indikator dengan Nilai Tidak Tercapai Tahun 2023

Berdasarkan klasifikasi standar penilaian kinerja, terdapat empat klasifikasi, yaitu tidak tercapai, cukup tercapai, tercapai, dan sangat tercapai. Indikator-indikator yang memiliki nilai capaian yang rendah atau tidak tercapai memiliki nilai kurang dari 60%, yaitu sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 19,05%
- b. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina 46,57%
- c. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri 36,20%

Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk 3 (tiga) indikator tersebut masih di bawah target yang ditetapkan. Namun untuk indikator laju pertumbuhan penduduk ini merupakan indikator negatif jadi semakin kecil nilainya maka akan semakin baik kinerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu meningkatkan upaya untuk mencapai kinerja di tahun mendatang. Upaya yang bisa dilakukan antara lain:

- 1) Perbaikan Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS):
 - Penguatan basis data awal jumlah PMKS di Kota Malang melalui pemutakhiran data DTKS atau PDKTSAM

- Evaluasi mendalam terhadap program PMKS untuk memahami kendala dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.
- Evaluasi lebih lanjut terhadap program penurunan PMKS untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.
- Penguatan strategi untuk meningkatkan kemandirian PMKS binaan.
- Perluasan Intervensi penanganan PMKS
- Perlunya penguatan kapasitas individu dan kelembagaan PSKS sebagai bagian potensi untuk merefungsionalisasi PMKS/PPKS
- Pengembangan strategi baru atau peningkatan pelaksanaan program untuk mencapai target yang ditetapkan.

2) Strategi Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk:

- Studi mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk.
- Pengembangan kebijakan atau program khusus untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
- Perlu penguatan KIE melalui media cetak dan media elektronik

Upaya-upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.



Gambar 3.3 Capaian Indikator dengan Nilai Tercapai Tahun 2023

Klasifikasi standar penilaian kinerja yang memiliki ketercapaian nilai 90 hingga 110 termasuk ke dalam klasifikasi tercapai. Berikut ini merupakan indikator-indikator yang memiliki nilai tercapai.

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 99,52%
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 99,71%
- c. TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) 105,29%
- d. Nilai SAKIP 106,25.

Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk 4 (empat) kategori tersebut sudah tercapai dengan baik. Meskipun demikian perlu ditekankan bahwa masih perlu meningkatkan upaya untuk menjaga dan mempertahankan kinerja yang sudah tercapai, serta untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan efektivitas program-program yang telah berhasil. Upaya yang bisa dilakukan antara lain:

- 1) Optimalisasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Gender
 - Kontinuasi pemantauan dan evaluasi program pembangunan gender untuk memastikan kelangsungan tingkat kinerja yang tinggi.
 - Inovasi dalam pendekatan dan strategi untuk lebih meningkatkan partisipasi dan dampak positif pada pemberdayaan gender.
 - Optimalisasi analisis mendalam terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok marginal.
 - Menerapkan monitoring dan evaluasi berbasis indikator gender untuk mengukur dampak program.
 - Membangun kemitraan dengan organisasi, lembaga donor, dan sektor swasta dalam melakukan edukasi masyarakat untuk mengubah stereotip gender.
- 2) Penguatan Program KB (TFR per WUS):
 - Analisis mendalam terhadap program Keluarga Berencana untuk memahami kendala dan peluang peningkatan.

- Penguatan strategi pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan peningkatan kesadaran untuk ber-KB di kalangan wanita usia subur.
- Menguatkan penyuluhan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat dan pentingnya perencanaan keluarga.
- Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga kesehatan, pendidikan, dan masyarakat sipil untuk memastikan pendekatan yang holistik dan mendukung.
- Memperkuat jejaring komunitas dan dukungan sosial untuk mengatasi stigma terkait KB serta memastikan kebijakan yang mendukung akses universal terhadap layanan KB, dan lakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan kebutuhan dan dinamika masyarakat.

3) Kelanjutan Peningkatan Nilai SAKIP

- Implementasi langkah-langkah perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Fokus pada inovasi dan efisiensi untuk terus meningkatkan nilai SAKIP.

Dengan menjaga fokus pada kualitas dan inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat di masa mendatang.



Gambar 3. 4 Capaian Indikator dengan Nilai Sangat Tercapai Tahun 2023

Klasifikasi standar penilaian kinerja yang memiliki ketercapaian nilai lebih dari 110% termasuk ke dalam klasifikasi sangat tercapai atau sangat berhasil. Berikut ini merupakan indikator yang memiliki nilai sangat tercapai atau sangat berhasil yaitu :

- a. Persentase Penurunan PMKS 274,98%
- b. Persentase Penyandang Cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan persentase 142,59%.
- c. Ratio KDRT dengan persentase 132,06%

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2018-2023 menjelaskan tentang penjabaran indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang berdasarkan perkembangan hasil realisasi dan capaian kinerja sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Berikut ini akan disajikan tabel yang memaparkan pencapaian indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang menyesuaikan dengan sasaran strategis beserta realisasi dan capaian kerjanya.

Tabel 3. 2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Realisasi Kinerja (Persentase)					Capaian Kinerja (Persentase)				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan PMKS	- 22.23	6.80	5.02	-0.42	3.76	13,75	136.00	100.40	-8.40	75.20	274,98
Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri	4.38	14.52	12.00	3.27	3.38	5,56	90.19	79.42	21.15	22.31	36,20
	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina	71.48	8.55	20.17	33.07	68.49	37,23	11.27	25.47	41.26	84.23	46,57
	Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	38.88	42.48	73.88	13.70	13.24	94.98	111.38	119.20	21.82	20.58	142.59
Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	IPG	94.71	94.71	94.58	95.16	95.24	95.54	97.84	97.61	98.10	98.08	99.52
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak	IDG	75	76,11	78,11	78,06	77,63	78,77	101,7	104,19	99,69	98,77	99,71
	Ratio KDRT	1 : 3175	1 : 25675	1 : 27355	1 : 27240	1 : 33523	1 : 36317	809,7	805,03	100,9	123,02	132,06
Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.63	0.53	0.27	0.13	0.133	0.12	84.13	43.55	20.00	20.78	19.05
Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	1.7	1.70	1.68	1.79	1.50	1.79	103.03	100.60	105.29	88.24	105.29
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	75.03	78.6	80.69	85.75	83.85	85.85	99.49	100.86	106.26	103.84	106.25

Hasil pengukuran atas realisasi dan capaian kinerja tahun 2018-2023 Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang mencapai pencapaian luar biasa. Capaian ini mencerminkan dedikasi yang tinggi dan kesuksesan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang, menunjukkan hasil sebagai berikut:

1) Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perlindungan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator Persentase Penurunan PMKS mengalami fluktuasi yang mencolok. Antara tahun 2020 sampai 2023, realisasi kinerja indikator ini mengalami variasi signifikan. Realisasi kinerja turun 5,02% dari 2020 ke 2021, namun mengalami peningkatan 4,18% dari 2021 ke 2022, dan di 2023 mengalami peningkatan berdasar data PDKTSAM. Capaian kinerja juga menunjukkan penurunan drastis dari 100,40% menjadi -8,4% dari 2020 ke 2021, lalu naik 83,6% dari 2021 ke 2022, dan naik pada 2023 menjadi 274,98%. Perlu diakui bahwa kinerja masih memerlukan peningkatan lebih lanjut. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya intervensi dan upaya lebih lanjut dalam penanganan untuk mencapai tingkat kinerja optimal dalam upaya penurunan Persentase PMKS.

- Sasaran : Meningkatkan Aksesibilitas Perlindungan Sosial untuk Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pelayanan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Jaminan Kesejahteraan.

a. Indikator 1 : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri menunjukkan fluktuasi kinerja yang signifikan. Pada tahun 2020-2021, terjadi penurunan drastis realisasi kinerja sebesar 12,00%, menjadi 3,27%, dengan capaian kinerja yang turun 79,42%, menjadi 21,15%. Namun pada tahun 2022-2023, terjadi kenaikan realisasi kinerja menjadi 5,56%, dengan capaian kinerja menjadi 36,20%. Pencapaian tersebut masih berada dalam klasifikasi tidak tercapai atau tidak berhasil, menunjukkan perlunya peningkatan kinerja untuk mencapai hasil yang lebih baik pada penanganan PMKS binaan yang terentaskan/mandiri.

- b. Indikator 2 : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina menunjukkan tren data realisasi kinerja yang mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Kenaikan tersebut mencapai 68.49%, sementara capaian kinerja juga naik sebesar 86,13%. Meskipun pencapaian hingga 2022 sudah cukup memuaskan, namun ditahun 2023 mengalami penurunan realisasi kinerja menjadi 37,23% atau dengan capaian 46,57% dikarenakan perlu dilakukan perluasan intervensi dan peningkatan lebih lanjut guna mencapai target yang ditetapkan serta perlu adanya upaya berkelanjutan untuk memastikan pencapaian yang optimal.
- c. Indikator 3 : Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial, yang telah menerima jaminan sosial menunjukkan kecenderungan tren realisasi kinerja yang menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2022, mengalami penurunan sebesar 73.88% menjadi 13.24%, dengan capaian kinerja yang juga menurun sebesar 119.2% menjadi 20.35%. namun terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu realisasi kinerja dari sejumlah 13.24% menjadi 94,98% dan tingkat capaian kinerja naik dari 20,35% menjadi 142,59% dengan tingkat keberhasilan sangat tercapai. Kecenderungan tren data yang menurun mengindikasikan performa yang kurang baik, namun 2023 menjadi tahun dengan capaian yang sangat berhasil.
- 2) Tujuan : Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan
- Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan kecenderungan tren realisasi kinerja yang meningkat dari tahun 2020 hingga 2023 dengan peningkatan mencapai angka realisasi 95,54%. Tren positif juga terlihat pada data capaian kinerja di tahun 2023 mencapai 99,51%. Peningkatan ini menandakan hasil yang baik, sehingga perlu dipertahankan kinerjanya. Peningkatan yang terus menerus pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencerminkan upaya yang berhasil dalam mencapai kesetaraan gender. Penting untuk

terus mempertahankan tren positif ini dan melanjutkan upaya untuk mencapai hasil yang lebih baik, memastikan bahwa gender tidak menjadi hambatan dalam akses dan partisipasi dalam pembangunan.

- Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Indikator 1 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan kecenderungan tren data realisasi kinerja yang mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022 mencapai angka 77,63%. Namun mengalami kenaikan pada penghujung tahun 2023 sebesar 78,77%. Tren serupa juga terlihat pada data capaian kinerja IDG, dengan penurunan dari 104,19% di tahun 2020 menjadi 98,77% di tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, pada tahun 2023 bebalik arah mengalami kenaikan sebesar 99,71% pencapaian tersebut sudah dianggap cukup berhasil, sehingga perlu dilakukan peningkatan sedikit untuk mencapai angka 100%. Walaupun ada penurunan, upaya untuk terus meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) akan memastikan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tetap menjadi fokus dalam pembangunan. Dengan sedikit peningkatan, IDG dapat mencapai standar optimal dan berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan setara.

b. Indikator 2 : Ratio KDRT menunjukkan tren data yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2023. Persentase capaian mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 132,06%. Keberhasilan ini menandakan bahwa sosialisasi dan penanganan KDRT yang dilakukan telah berhasil memberikan rasa aman terhadap masyarakat dari kasus kekerasan yang terjadi.

- 3) Tujuan : Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas

Indikator laju pertumbuhan penduduk menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021, mengalami penurunan dari 0,27% menjadi 0,13%. Dari tahun 2021 hingga 2022, indikator ini menunjukkan sifat data yang tetap, dengan realisasi

konsisten sejumlah 0,13%. Dan realisasinya mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 0,12%. Pencapaian ini menandakan peningkatan yang baik karena ini merupakan indikator negatif yang semakin sedikit nilai persentasenya maka semakin baik kinerjanya, namun masih perlu untuk dipertahankan peningkatan upaya kinerja guna mencapai target laju pertumbuhan penduduk yang lebih optimal. Dengan pemahaman akan fluktuasi dan penurunan yang terjadi langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas dalam meraih hasil yang lebih baik di masa depan.

- Sasaran : Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Indikator TFR per WUS (15 hingga 49 tahun) menunjukkan tren fluktuatif dalam data realisasi kinerja selama tiga tahun terakhir. Realisasi kinerja dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi yang sedang. 2021 ke 2022 realisasi mengalami penurunan 1,5% dan di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 1,79%. Keberlangsungan nilai yang naik menandakan perlunya upaya pencapaian kinerja untuk mencapai capaian yang sesuai dengan target yang ditetapkan, karena indikator ini juga merupakan indikator negatif dimana nilai yang semakin kecil maka akan semakin baik kinerjanya.

- Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Nilai SAKIP mencerminkan sifat data realisasi kinerja dan capaian kinerja yang fluktuatif. Pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan realisasi kinerja sebesar 5,06% mencapai 85,75%, dengan capaian yang naik 5,44% menjadi 106,3%. Pada tahun 2021 hingga 2022, terjadi penurunan realisasi kinerja sebesar 1,9%, menjadi 83,85%, dan capaian kinerja turun 2,46%, menjadi 103,84%. Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi kinerja sebesar 2%, mencapai 85,85%, dan capaian kinerja meningkat 2,41%, menjadi 106,25%. Meskipun terdapat fluktuasi, ketercapaian ini masih dinilai baik, walaupun terdapat penurunan yang tidak terlalu signifikan pada

tahun 2020 hingga tahun 2021. Pemahaman terhadap perubahan ini memungkinkan perbaikan strategis untuk menjaga dan meningkatkan Nilai SAKIP secara konsisten di masa mendatang.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang ada dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 3
Realisasi Kinerja sampai tahun ini yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja (%)				
			2023 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penurunan PMKS	5	6.80	5.02	-0.42	3.76	13,75
2	Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri	15,37	14.52	12.00	3.27	3.38	5,56
		Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina	79.94	8.55	20.17	33.07	68.49	37,23
		Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	66.61	42.48	73.88	13.70	13.24	94,98
3	Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai	IPG	96	94.71	94.58	95.16	95.24	95,54

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja (%)				
			2023 (%)	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	tindak kekerasan							
4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak	IDG	79	76,11	78,11	78,06	77,63	78,77
		Ratio KDRT	1 : 27500	1 : 25675	1 : 27355	1 : 27240	1 : 33523	1 : 36317
5	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.63	0.53	0.27	0.13	0.13	0,12
6	Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	1,70	1,72	1,68	1,79	1,5	1,79
7	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	80,8	78,6	80,69	85,78	83,85	85,85

Indikator persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam realisasinya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun ini realisasi mencapai 13,75%, dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 5% kelebihan sebesar 8,75%. Oleh karena itu, diperlukan mempertahankan kerjasama, sinergitas, dan optimalisasi antar perangkat daerah dalam penanganan PMKS. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci dalam mencapai target penurunan PMKS yang diinginkan. Upaya bersama ini akan memastikan bahwa berbagai sumber daya dan strategi

dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan realisasi dan mencapai tingkat penurunan yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator berikutnya adalah persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri. Pada tahun 2023 realisasi kinerja indikator ini mencapai 5,56% sementara target jangka menengah tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berada di angka 15,37%. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 masih belum mencapai target jangka menengah dengan selisih realisasi sejumlah 9,81%. Untuk mencapai target yang diinginkan, perlu adanya evaluasi dan strategi perbaikan yang efektif, kolaborasi antar pihak terkait, peningkatan upaya bimbingan, dan pemanfaatan sumber daya yang optimal menjadi kunci untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator ini.

Indikator berikutnya adalah Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina. Pada tahun 2023 hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 37,23% mengalami penurunan signifikan dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 33,07%. Sementara itu target jangka menengah tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berada di angka 79,94%. Pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 belum mencapai target jangka menengah sehingga menunjukkan kurangnya efektivitas dalam penanganan PMKS dan penerapan strategi yang belum optimal.

Indikator berikutnya adalah Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Pada tahun 2023 hasil realisasi kinerja indikator ini mengalami kenaikan cukup signifikan mencapai 94,98% sedangkan di tahun sebelumnya berada di angka 13,24%. Sementara itu target jangka menengah tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berada di angka 66,61%. Pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 jauh melebihi target jangka menengah dengan capaian 142,59%.

Selanjutnya adalah indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dalam realisasi yang ada IPG selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan tren positif yang perlu dipertahankan dalam

pelaksanaannya. Pada tahun 2023 realisasi kinerja mencapai 95,54% namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 sebesar 96,00% masih terdapat kekurangan sebesar 0,46%. Penting untuk dicatat bahwa penyesuaian target pada waktu P-RPJMD tidak diperbolehkan, sehingga menciptakan tantangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Indikator selanjutnya adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di mana hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 78,77% pada tahun 2023. Sementara itu target jangka menengah tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berada di angka 79%. Pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 masih belum mencapai target jangka menengah dengan selisih realisasi sejumlah 0,23%. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada IDG diperlukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor penyebab penurunan serta rencana strategis untuk mengatasi dan memperbaiki pencapaian di masa yang akan datang.

Indikator berikutnya adalah Ratio KDRT pada tahun 2023 hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 1:36.317 dan tahun 2022 realisasi 1:33.523. Sementara itu, target jangka menengah tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berada di angka 1:27.500. Meskipun terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 masih melampaui target yang telah ditetapkan. Kenaikan ratio KDRT tetap perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor penyebabnya dan evaluasi yang terus menerus demi perbaikan strategis yang diperlukan untuk memastikan penurunan tersebut tidak berdampak negatif pada upaya pencegahan dan penanganan KDRT.

Selanjutnya indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dalam realisasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 realisasi mencapai 0,12 sedangkan target jangka menengah sebesar 0,63. Terdapat kekurangan sebesar 0,51% dari target sehingga perlu diperhatikan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan penguatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) melalui media cetak dan elektronik sebagai bahan edukasi kepada masyarakat. Upaya penguatan KIE akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait laju pertumbuhan penduduk serta memotivasi partisipasi dalam program-program pengendalian

pertumbuhan penduduk. Kolaborasi antar lembaga dan pihak terkait juga dapat memperkuat upaya penyuluhan dan edukasi dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik untuk mencapai target yang diinginkan. Namun kembali lagi ini merupakan indikator negatif yang dimanapun semakain kecil nilai persentasenya maka akan semakin baik kinerjanya.

Indikator berikutnya adalah TFR per WUS (usia 15 hingga 49 tahun). Pada tahun 2023 realisasi kinerja indikator ini mencapai 1,79 sedangkan sebelumnya adalah sebesar 1,68 (2020), 1,70 (2019), 1,79 (2021) dan 1,5 (2022). Sementara itu target jangka menengah tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berada di angka 1,7. Pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 sudah mencapai target jangka menengah dan naik dari tahun sebelumnya. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk. Program edukasi dan penyuluhan perlu ditingkatkan serta kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan upaya yang lebih efektif dalam mencapai target pengendalian fertilitas yang berkelanjutan. Namun kembali lagi ini merupakan indikator negatif yang dimanapun semakain kecil nilai persentasenya maka akan semakin baik kinerjanya.

Indikator Nilai SAKIP pada tahun 2023 mencapai realisasi kinerja sebesar 85,85% menunjukkan peningkatan secara berkelanjutan sejak tahun 2019. Dalam rentang tahun 2019-2021 terjadi kenaikan kinerja namun pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 1,93% mencapai 83,85%. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan kembali sebesar 2% mencapai 85,85%. Sementara itu target jangka menengah tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 berada di angka 80,8. Pencapaian realisasi kinerja tahun 2023 telah melampaui target jangka menengah meskipun terdapat penurunan pada rentang tahun sebelumnya. Penurunan pada tahun 2022 dan peningkatan pada tahun 2023 menunjukkan respons adaptif terhadap perubahan kondisi dan upaya perbaikan yang telah berhasil dilakukan. Diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami faktor penyebab penurunan sementara pada tahun sebelumnya dan langkah-langkah yang efektif untuk memastikan kesinambungan peningkatan kinerja di masa mendatang.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).

1. Dengan mengacu pada standart pelayanan minimal (SPM/Standar nasional lainnya)

Tabel 3. 4

Realisasi Kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

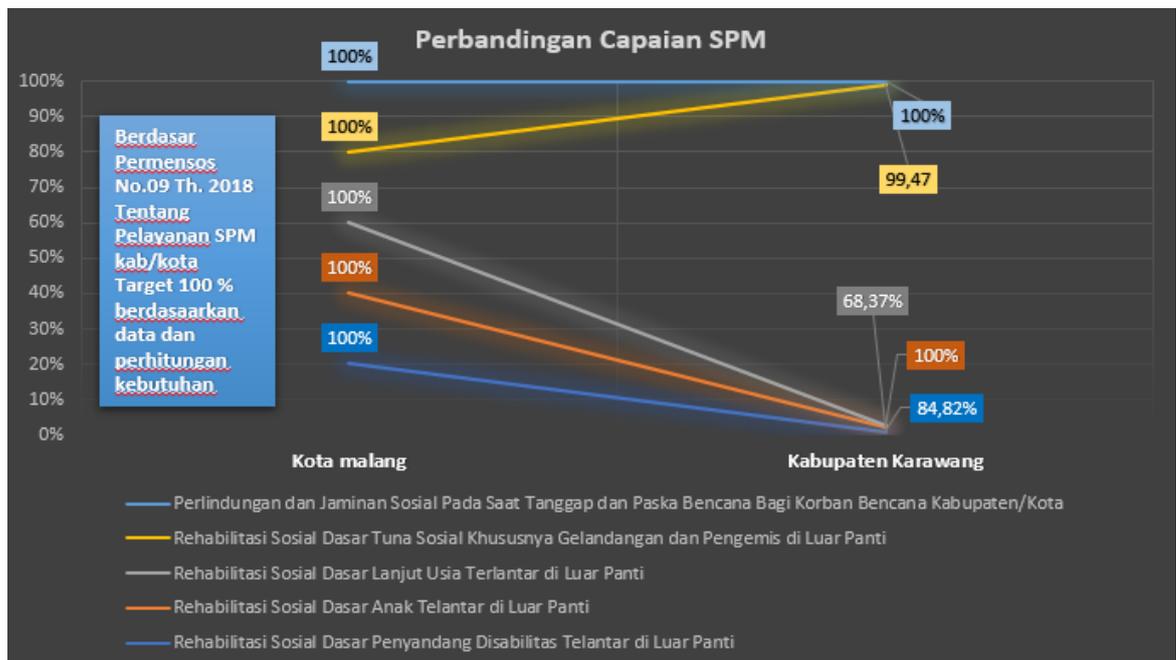
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional Kab/Kota	
			2023	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	3		4	5
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana pada dasarnya telah berhasil merealisasikan seluruh target yang ditetapkan. Pada tahun 2023 realisasi kinerja standard pelayanan minimal mencapai 100%. Evaluasi

dan pengoptimalan alokasi anggaran perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan efisiensi penanganan standar pelayanan minimal.

2. Dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional (Benchmark kinerja)

Perbandingan Benchmark dibawah ini diambil dari tabel capaian spm pada website Kabupaten Karawang, karena benchmark untuk daerah lain di kabupaten/kota sekitar tidak ditemukan atau tidak terpublikasi pada website.



Gambar 3. 3 realisasi kinerja di level nasional atau internasional (Benchmark kinerja)

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.

Pencapaian kinerja tahun 2023 mencerminkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Evaluasi mendalam perlu dilakukan untuk mengidentifikasi pelajaran berharga dan perbaikan yang diperlukan sebagai landasan untuk perencanaan kegiatan yang lebih efektif di tahun mendatang.

Dalam mengevaluasi pencapaian kinerja terdapat sejumlah keberhasilan dan kegagalan yang dapat diidentifikasi. Keberhasilan melibatkan capaian target atau peningkatan layanan yang positif sementara kegagalan mungkin terkait dengan ketidakmampuan mencapai

target tertentu atau hambatan dalam pelaksanaan program. Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam realisasinya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun ini realisasi mencapai 13,75%, namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 5% masih terdapat lebih capaian sebesar 8,75%. Oleh karena itu, diperlukan mempertahankan kerjasama, sinergitas, dan optimalisasi antar perangkat daerah dalam penanganan PMKS. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci dalam mencapai target penurunan PMKS yang diinginkan. Upaya bersama ini akan memastikan bahwa berbagai sumber daya dan strategi dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan realisasi dan mencapai tingkat penurunan yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Aksesibilitas Perlindungan Sosial untuk Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pelayanan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Jaminan Kesejahteraan dalam pencapaiannya didukung oleh indikator yang meliputi :
 - a. Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri pada tahun 2023 memiliki target kinerja 15,37%. Realisasi kinerja indikator ini hanya mencapai 5,56% sehingga kondisi ini memerlukan perhatian dan perbaikan. Capaian kinerja yang masih 36,20% diklasifikasikan sebagai tidak tercapai. Ketidackapaian tersebut disebabkan oleh kurangnya sinergitas dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait dengan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS). Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih efektif dan kolaboratif antar instansi terkait. Peningkatan koordinasi, komunikasi, serta peran aktif dari seluruh pihak terlibat dapat menjadi solusi untuk

meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan.

- b. Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina pada tahun 2023 memiliki target kinerja 79,94%. Hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 37,23% menunjukkan capaian yang kurang optimal dan perlu ditingkatkan. Capaian indikator ini 46,57% termasuk ke dalam kategori tidak tercapai. Hal ini menandakan bahwa upaya penanganan dan pembinaan terhadap PMKS masih kurang maksimal. Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan dapat menjadi langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan PMKS di masa depan. Kemudian masih terdapat kendala pada sistem pendataan yang belum dipilah secara berkala. Penting untuk melakukan pemilahan data secara teratur guna memastikan bahwa penanganan dan binaan dapat ditujukan kepada yang membutuhkan dan menghindari kesalahan sasaran. Selain itu, perlu perbaikan dalam penjadwalan pelaksanaan kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program kesejahteraan sosial bagi PMKS.
- c. Indikator Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah menerima jaminan sosial di tahun 2023 memiliki target kinerja 66,61%. Dengan realisasi kinerja 94,98%, yang menunjukkan ketercapaian yang tinggi dan perlu dipertahankan. Hal ini juga dikarenakan adanya pendataan secara berkala yang memudahkan perhitungan dalam capaian kinerja.

Tujuan 2 : Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2023 memiliki target kinerja sejumlah 96%. Hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 95,54%, mendekati target yang ditentukan dengan capaian 99,52%. Pencapaian tersebut dapat dikategorikan sebagai berhasil, menunjukkan upaya positif dalam pembangunan gender di Kota Malang.

Namun, dalam meraih kesuksesan tersebut, terdapat kendala dalam sistem pendataan yang belum terpilah secara berkala. Koordinasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu ditingkatkan untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang digunakan dalam mengukur Indeks Pembangunan Gender.

- Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pencapaiannya didukung oleh indikator yang meliputi:
 - a. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2023 memiliki target kinerja 79%. Hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 78,77%. Meskipun belum mencapai target yang ditentukan capaian kinerja 99,71% menunjukkan bahwa kinerja IDG telah mendekati pencapaian yang diharapkan. Pencapaian tersebut dapat dikategorikan sebagai berhasil. Namun dalam meraih kesuksesan tersebut ditemukan beberapa kendala terutama terkait sistem pendataan yang belum terpilah secara berkala. Koordinasi data dengan Badan Pusat Statistik dan Dispendukcapil terutama dalam hal data kepala rumah tangga perempuan perlu ditingkatkan.
 - b. Indikator Ratio KDRT pada tahun 2023 memiliki target kinerja 1:27.500. Hasil realisasi kinerja indikator ini mencapai 1:36.317 dengan capaian 132,06%. Kondisi ini menunjukkan kategori sangat baik namun masih perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan pencapaian target. Peningkatan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui langkah-langkah strategis seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sosialisasi pencegahan dan penanganan KDRT peningkatan aksesibilitas layanan perlindungan bagi korban serta penguatan kerja sama lintas sektor untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan KDRT.

Tujuan 3 : Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas

Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2023 memiliki target kinerja 0,63. Realisasi kinerja indikator ini mencapai 0,12 dengan capaian kinerja 19,05%. Kondisi ini perlu ditingkatkan karena

ketercapaian indikator ini masih jauh di bawah target yang telah ditentukan. Ketercapaian tersebut masih rendah karena terdapat faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi program pengendalian penduduk, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dan kendala-kendala lainnya yang mempengaruhi pencapaian target. Untuk meningkatkan kinerja indikator ini perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai program pengendalian penduduk, pelibatan lebih aktif peran pemangku kepentingan, dan implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung pengendalian pertumbuhan penduduk. Evaluasi mendalam terhadap hambatan-hambatan yang diidentifikasi akan membantu merancang strategi yang lebih efektif dan menyeluruh guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. Perlu ditegaskan juga karena ini merupakan indikator negatif jadi yang jika semakin kecil presentase semakin bagus namun ini juga menandakan kurang optimalnya perencanaan penentuan target yang dilakukan. Namun kembali lagi ini merupakan indikator negatif yang dimanan semakain kecil nilai persentasenya maka akan semakin baik kinerjanya.

- Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam pencapaiannya didukung oleh Indikator TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) pada tahun 2023 memiliki target kinerja sejumlah 1,7. Realisasi kinerja indikator ini mencapai 1,79 dengan capaian kinerja sebesar 105,29% yang termasuk dalam klasifikasi berhasil. Meskipun telah mencapai capaian yang positif hal ini perlu dipertahankan. Upaya tersebut dapat memberikan dampak positif dalam mencapai target yang lebih optimal pada masa yang akan datang. Namun kembali lagi ini merupakan indikator negatif yang dimanan semakain kecil nilai persentasenya maka akan semakin baik kinerjanya.
- Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, yang diukur melalui indikator nilai SAKIP. Pada tahun 2023 mencapai hasil yang sangat positif dengan target kinerja yang ditetapkan 80,80% berhasil terlampaui dengan realisasi kinerja 85,85% dengan capaian kinerja 106,25%. Keberhasilan ini

menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan melampaui harapan yang menandakan efektivitas pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Upaya perbaikan dan penguatan dapat terus diterapkan untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja yang optimal.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah diperlukan untuk mengetahui hubungan antara penyerapan anggaran dengan pencapaian target kinerja. Berdasarkan hal tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjabarkan penggunaan sumberdaya (anggaran) sebagai berikut:

TABEL 3.6
ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Capaian Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri	15.37	5,56	36,20	4,276,922,691.00	4,058,768,801.00	94.90	31.44
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina	79.94	37,23	46,57	17,223,156,800.00	8,634,172,391.00	50.13	41.33
	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	66.61	94.98	142.59	17,094,802,300.00	8,409,609,826.00	67.31	211.83
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan	IDG	79	78.77	99.71	3,342,076,000.00	2,891,222,737.00	86.51	115.26

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Capaian Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
perempuan dan anak	Ratio KDRT	1 : 27500	1 : 36317	132,06	1,538,195,412.00	1,466,598,995.00	95.35	138,51
Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	1.7	1.79	105.29	10,032,668,000.00	9,015,059,673.00	89.86	117.18
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	80.8	85.85	106.25	15,439,173,008.00	12,994,608,381.00	84.17	126.24
Rata-rata				106,22	68,946,994,211.00	50,567,636,778.00	73.34	123,97

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya khususnya dalam perbandingan antara kinerja dan anggaran menunjukkan adanya pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana. Evaluasi ini menggambarkan bahwa pengelolaan anggaran telah memberikan hasil yang sejalan dengan pencapaian kinerja yang diharapkan. Peningkatan efisiensi anggaran mencerminkan upaya yang berhasil untuk memaksimalkan nilai dari setiap bentuk pengeluaran, mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang lebih efektif. Hal ini menunjukkan langkah positif dalam manajemen sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut pencapaian yang didukung oleh indikator yang meliputi:

- 1) Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri realisasi kinerja 5,56% dengan capaian 36,20%. Terdapat dua program untuk menunjang indikator ini yaitu Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Capaian anggaran dari kedua program tersebut adalah 94,90%. namun masih perlu dilakukan peningkatan upaya dalam implementasi program pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan guna mencapai kinerja anggaran yang optimal.
- 2) Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina realisasi kinerja 37,23% dengan capain kinerja 46,57%. Terdapat dua program untuk menunjang indikator ini yaitu Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana. Capaian anggaran dari kedua program tersebut adalah 50,13%. Meskipun terdapat capaian efisiensi 41,33% namun masih perlu dilakukan peningkatan upaya dalam implementasi Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana guna mencapai kinerja yang optimal.
- 3) Indikator Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah menerima jaminan sosial mencapai capaian kinerja sebesar 142,59%. Program yang menunjang indikator ini yaitu Program Perlindungan Jaminan Sosial dengan realisasi anggaran 67,31%. Meskipun terdapat capaian efisiensi 211,83% dan

menunjukkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan dan bisa dikatakan efektif karena mampu mencapai kinerja yang optimal. Namun masih diperlukan peningkatan upaya-upaya melalui implementasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mempertahankan target yang diinginkan.

- 4) Indikator Indeks Pembangunan Gender (IDG) realisasi kinerja 78,77% dengan capaian kinerja 99,71%. Terdapat dua program untuk menunjang indikator ini yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan realisasi anggaran 86,51%. Meskipun terdapat capaian efisiensi 115,26% dan menunjukkan adanya efisiensi anggaran dalam penyerapan anggaran yang efektif menandakan bahwa upaya ini telah berhasil digunakan secara efisien namun belum mampu mencapai kinerja yang ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan upaya ini dalam pencapaian kinerja melalui Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga guna mencapai kinerja yang optimal.
- 5) Indikator Ratio KDRT dengan realisasi kinerja 1:36317 capaian kinerja 132,06% menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Terdapat dua program untuk menunjang indikator ini yaitu Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak dengan realisasi anggaran 95,35%. Meskipun terdapat capaian efisiensi 138,51% namun masih diperlukan peningkatan upaya-upaya melalui Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak guna mencapai kinerja yang diharapkan.
- 6) Indikator TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) dengan realisasi kinerja 1,79 capaian kinerja 105,29% menunjukkan prestasi yang baik dalam mencapai target. Terdapat tiga program untuk menunjang indikator ini dengan realisasi anggaran 89,86%. Meskipun terdapat capaian efisiensi 117,18% dari tiga program, namun penyerapan anggaran masih belum optimal. Meskipun capaian kinerja yang melampaui target menunjukkan keberhasilan dalam implementasi Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) namun masih

diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran guna mendukung keberlanjutan keberhasilan capaian kinerja tersebut.

- 7) Indikator Nilai SAKIP dengan capaian kinerja 106,25% menunjukkan hasil kinerja yang sangat baik dalam mencapai target dan efisiensi anggaran sebesar 15,83%. Meskipun capaian kinerja telah melampaui target dan menunjukkan keberhasilan dalam implementasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran guna mendukung keberlanjutan keberhasilan capaian kinerja tersebut.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Secara garis besar program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian perjanjian kinerja disampaikan dalam tabel berikut.

TABEL. 3.7
KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan /mandiri	36,20	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100	100	100.00	
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara Dengan Baik	100	100	100.00	
	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina	46,57	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100	100	100.00	
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan	14.26	20.21	141.73	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya				
	Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	142.59	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	75.5	20.16	26.70	Perlu adanya peningkatan perluasan intervensi penanganan/pemberian bantuan pada PMKS yang seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya yang ada.
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak	IDG	99.71	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	96.5	100	103.63	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga	0.06	1.00	1673%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	100	94.	94.12	Perlu adanya pendampingan kepada OPD yang belum ARG
	Ratio KDRT	132,06	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100.00	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100.00	
Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	105.29	Program Pengendalian Penduduk	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	1.7	1.79	105.29	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	75.5	75.88	100.50	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok UPPKS Aktif	92.75	93.33	100.63	
				Persentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif	85.5	83.4	97.54	Perlu pendampingan bagi kelompok Tribina agar bisa aktif kembali
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	106.25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	100	100.00	

Tabel 3.8 Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan

Program	Indikator Kinerja	Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100,00%			100	%	100	100,00%	-
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100	%	100	100,00%	-
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100	%	100	100,00%	-
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100	%	100	100,00%	-

Program	Indikator Kinerja	Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100	%	100	100,00%	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100	%	100	100,00%	-
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	100	%	100	100,00%	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00%	-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	%	100	100,00%	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100,00%			100	%	100	100,00%	-
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi pengumpulan uang dan barang (PUB)	20	Lembaga	17	85,00%	Kelengkapan administrasi belum lengkap/dalam proses, tindak lanjut

Program	Indikator Kinerja	Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
									sosialisasi setiap tahun
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang terfasilitasi	452	Orang	452	100,00%	-
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara Dengan Baik	100,00%			100	%	100	100,00%	-
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2	Makam	2	100,00%	-
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya	141,73%			14,26	%	20,21	141,73%	-

Program	Indikator Kinerja	Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	14,26	%	20,21	141,73%	-
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100	%	92,77	92,77%	Perlu adanya penyesuaian target pada saat adanya perubahan penerima bantuan permakanan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINANSOSIAL	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	26,70%			75,5	%	20,16	26,70%	Perlu adanya peningkatan perluasan intervensi penanganan/pemberian bantuan pada PMKS yang seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya yang ada.
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terlayani	10	Anak	52	520,00%	-

Program	Indikator Kinerja	Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang tervalidasi	1	Dokumen	1	100,00%	-
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100,00%			100	%	100,00	100,00%	-
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	100	%	100,00	100,00%	-
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Tagana yang diberdayakan	100	%	100	100,00%	-
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	103,63%			96,5	%	100,00	103,63%	-
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah focal point PUG	85	OPD	80	94,12%	Perlu adanya pendampingan bagi OPD yang belum membuat focal point PUG

Program	Indikator Kinerja	Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	1	100,00%	-
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi wanita yang terfasilitasi	25	Organisasi	25	100,00%	-
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga	1673%			0,06	%	1,00	1673%	-
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ibu rumah tangga yang mendapatkan pelatihan	50	Orang	50	100,00%	-

Program	Indikator Kinerja	Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga	2802	Orang	2802	100,00%	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	94,12%			100	%	94,12	94,12%	Perlu adanya pendampingan bagi OPD yang belum menerapkan ARG
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	2	Dokumen	0	0,00%	Anggaran dialihkan untuk kegiatan prioritas
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00%			100	%	100	100,00%	-

Program	Indikator Kinerja	Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	25	Orang	34	136,00%	-
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan	2	Lembaga	2	100,00%	-
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00%			100	%	100	100,00%	-
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi	1	Dokumen	1	100,00%	-

Program	Indikator Kinerja	Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak yang ditangani	30	Orang	58	193,33%	-
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	105,29%			1,7	%	1,79	105,29%	-
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah laporan	1	Laporan	1	100,00%	-
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	4	Dokumen	4	100,00%	-
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	100,50%			75,5	%	75,88	100,50%	-

Program	Indikator Kinerja	Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pelaksanaan dan pengendalian KIE	4	Kali	4,00	100,00%	-
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas	Jumlah PLKB yang aktif	32	Orang	32	100,00%	-
			Lapangan KB (PKB/PLKB)						
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase alat dan obat kontrasepsi yang terfasilitasi	100	%	100,00	100,00%	-
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	5	Organisasi	5	100,00%	-

Program	Indikator Kinerja	Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok UPPKS Aktif	100,63%			92,75	%	93,33	100,63%	-	
	Persentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif	97,55			85,5	%	83,4	97,55	Perlu pendampingan bagi Tribina yang fakum (tidak aktif)	
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan	2	Laporan	2	100,00%	-
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi yang aktif dan ikut dalam kegiatan	8	Organisasi	8	100,00%	-

1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut:

- Sasaran 1: Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah Indikator Nilai SAKIP dengan target 80,8% telah **berhasil** dengan realisasi sebesar 85,85% atau tercapai 106,25%.

Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dengan target 100% telah berhasil dengan realisasi kinerja 100%.

- Sasaran 2: Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan

- Indikator 1 : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri dengan target 15,37% **kurang berhasil** dengan realisasi sebesar 5,56% atau tercapai 36,20% melalui program:

- Program Pemberdayaan Sosial

Indikator kinerja pada program ini tercapai 100% dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas pekerja dan lembaga kesejahteraan sosial.

- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Indikator kinerja pada program ini tercapai 100% yang dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

- Indikator 2: Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina dengan target 79,94% **kurang berhasil** realisasi 37,23% atau capaian 46,57% melalui program:

- Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya

tercapai 141,73% yang dilakukan melalui rehabilitasi penanganan SPM dan di luar SPM.

- Program Penanganan Bencana

Indikator kinerja pada program ini tercapai 100% yang dilakukan melalui kegiatan pemberian bantuan pada korban bencana berupa sandang, pangan dan dukungan psikososial dan Pemberrdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana dan perlindungan sosial korban bencana alam

- Indikator 3: Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan target 66,61% **sangat berhasil** dengan realisasi 94,98% atau dengan capaian 142,59% melalui program:

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator kinerja pada program ini hanya tercapai 29,70% yang dilakukan melalui pemeliharaan anak terlantar dan pengelolaan data fakir miskin sehingga masih perlu adanya peningkatan perluasan intervensi penanganan/pemberian bantuan pada PMKS yang seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya yang ada.

- Sasaran 3: Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak

- Indikator 1: IDG dengan target 79% **Cukup berhasil** dengan realisasi 78,77% dan capaian kinerja sebesar 99,71 melalui program:

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Indikator kinerja pada program ini tercapai 103,63%. Kegiatan yang dilakukan untuk ketercapaian target kinerja meliputi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Indikator kinerja pada program ini tercapai 94,12% sehingga masih perlu adanya pendampingan bagi OPD yang belum menerapkan ARG

- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Indikator kinerja pada program ini tercapai 1673% dikarenakan adanya penambahan peserta dari anggaran pikir dan musrenbang. Kegiatan dilakukan melalui pelatihan ketrampilan bagi perempuan dan kepala keluarga perempuan.
- Indikator 2: Ratio KDRT dengan target 1:27500 **sangat berhasil** dengan realisasi 1:36317 dan capaian kinerja sebesar 132,06% melalui program:
 - Program Perlindungan Perempuan
Indikator kinerja pada program ini tercapai 100% yang dilakukan melalui sosialisasi, Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.
 - Program Perlindungan Khusus Anak
Indikator kinerja pada program ini tercapai 100% yang dilakukan melalui sosialisasi, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak serta Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.
- Sasaran 4: Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
Indikator 1 TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) dengan target 1,70% **berhasil** dengan capaian 105,29% melalui program:
 - Program Pengendalian Penduduk
Indikator kinerja pada program ini tercapai 105,29% yang dilakukan melalui Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Indikator kinerja pada program ini tercapai 100,50% yang dilakukan melalui Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian

dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Indikator kinerja pada program ini tercapai 100,63% dan 97,55% yang dilakukan melalui Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

2) Upaya Perbaikan Pada Perencanaan Berikutnya

Upaya perbaikan pada perencanaan menjadi krusial untuk meningkatkan pencapaian indikator yang belum tercapai. Berikut merupakan langkah-langkah perbaikan untuk setiap indikator klasifikasi yang belum tercapai:

- 1) Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Ditangani/Dibina:
 - a. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial dan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi PMKS yang belum terjangkau.
 - b. Memperkuat program-program pemberdayaan sosial dan pendampingan untuk meningkatkan partisipasi PMKS dalam kegiatan sosial.
 - c. Evaluasi lebih lanjut terhadap metode identifikasi dan pendekatan pemberdayaan yang diterapkan untuk memastikan efektivitasnya.
- 2) Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Binaan yang Terentaskan/Mandiri:
 - a. Pengembangan program pelatihan keterampilan dan pendampingan yang lebih intensif untuk mempersiapkan PMKS menuju kemandirian.

- b. Peningkatan kolaborasi dengan pihak terkait termasuk sektor swasta dalam menciptakan peluang pekerjaan bagi PMKS.
 - c. Evaluasi dampak program binaan yang ada untuk menilai keberhasilan dan menentukan area perbaikan yang diperlukan.
- 3) Indikator Laju pertumbuhan penduduk:
- a. Indikator ini merupakan indikator negative sehingga semakin kecil prosentase capaian akan semakin baik, namun ini merupakan indikasi kurang sesuainya perencanaan terkait laju pertumbuhan penduduk.

Melalui upaya-upaya ini diharapkan perencanaan dapat ditingkatkan untuk mendukung pencapaian indikator yang belum tercapai, sehingga program-program kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih efektif dan merata.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 penyerapan anggaran belanja langsung mencapai 73,34% dari total anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini mencerminkan upaya organisasi untuk efisien dalam penggunaan sumber daya keuangan yang telah disediakan. Untuk lebih memahami bagaimana anggaran tersebut digunakan guna mencapai kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berikut tabel rincian anggaran dan realisasinya:

Realisasi Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2023

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.439.173.008,00	12.994.608.381	84,17%
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.300.100,00	186.360.031	89,90%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.110.000,00	91.111.500	94,80%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	87.780.000,00	75.220.000	85,69%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	21.910.100,00	19.285.500	88,02%

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	743.031	49,54%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.645.152.207,00	7.840.174.329	81,29%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.642.152.207,00	7.838.481.029	81,29%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	1.693.300	56,44%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	66.580.000,00	66.554.121	99,96%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	66.580.000,00	66.554.121	99,96%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.879.550,00	192.513.750	84,48%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.879.550,00	192.513.750	84,48%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.147.093.323,00	1.806.820.870	84,15%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.000.000,00	33.827.930	99,49%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.619.962,00	205.441.136	98,01%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.680.000,00	131.745.025	95,96%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.000.000,00	34.899.100	91,84%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.250.000,00	3.519.925	67,05%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	.722.543.361,00	1.397.387.754	81,12%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	492.595.745,00	460.594.300	93,50%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	492.595.745,00	460.594.300	93,50%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.474.158.750,00	1.412.150.538	95,79%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	113.992.000,00	107.772.500	94,54%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.100.000,00	283.234.120	88,48%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.040.066.750,00	1.021.143.918	98,18%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.178.413.333,00	1.029.440.442	87,36%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	588.150.000,00	460.669.792	78,33%
Pemeliharaan Mebel	9.500.000,00	9.000.000	94,74%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.403.333,00	56.326.650	81,16%

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	511.360.000,00	503.444.000	98,45%
	Rata-rata Capaian Kegiatan		89,55%
	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan		80,57%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.905.149.767,00	3.791.179.736	97,08%
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	38.927.950,00	36.575.750	93,96%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	38.927.950,00	36.575.750	93,96%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.866.221.817,00	3.754.603.986	97,11%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.178.430.600,00	2.155.313.052	98,94%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.687.791.217,00	1.599.290.934	94,76%
	Rata-rata Capaian Kegiatan		95,54%
	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan		95,88%
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	371.772.924,00	267.589.065	71,98%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	371.772.924,00	267.589.065	71,98%
1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	371.772.924,00	267.589.065	71,98%
	Rata-rata Capaian Kegiatan		71,98%
	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan		71,98%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	16.940.991.800,00	8.409.609.826	49,64%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.503.266.800,00	4.479.572.321	81,40%
Penyediaan Perumahan	4.347.295.000,00	3.451.613.600	79,40%
Penyediaan Sandang	26.730.000,00	25.108.325	93,93%
Penyediaan Alat Bantu	263.120.000,00	251.680.000	95,65%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.640.000,00	4.600.000	53,24%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	831.826.800,00	734.788.576	95,98%
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.500.000,00	900.000	60,00%

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.975.000,00	1.350.000	68,35%
Pemberian Layanan Rujukan	22.180.000,00	9.531.820	42,97%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	11.437.725.000,00	3.930.037.505	34,36%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	21.240.000,00	19.294.300	90,84%
Penyediaan Permakanan	11.374.429.000,00	3.899.584.925	34,28%
Penyediaan Sandang	6.930.000,00	6.213.780	89,66%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	19.786.000,00	1.000.000	5,05%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.240.000,00	-	0,00%
Pemberian Layanan Rujukan	4.100.000,00	2.399.500	58,52%
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6.000.000,00	1.545.000	25,75%
	Rata-rata Capaian Kegiatan		57,88%
	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan		53,18%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	17.094.802.300,00	11.507.205.800	67,31%
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	13.530.000,00	10.160.500	75,10%
Rujukan Anak-Anak Terlantar	7.150.000,00	4.612.000	64,50%
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	6.380.000,00	5.548.500	86,97%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	17.081.272.300,00	11.497.045.300	67,31%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	167.458.000,00	148.973.000	88,96%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	16.913.814.300,00	11.348.072.300	67,09%
	Rata-rata Capaian Kegiatan		71,20%
	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan		76,88%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	282.165.000,00	224.562.565	79,59%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	162.345.000,00	117.418.565	72,33%
Penyediaan Makanan	117.870.000,00	86.652.050	73,51%
Penyediaan Sandang	20.000.000,00	16.870.115	84,35%
Pelayanan Dukungan Psikososial	24.475.000,00	13.896.400	56,78%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	119.820.000,00	107.144.000	89,42%

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	119.820.000,00	107.144.000	89,42%
	Rata-rata Capaian Kegiatan		80,87%
	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan		76,02%
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	536.868.000,00	462.667.514	86,18%
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	98.990.000,00	75.544.250	76,32%
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	98.990.000,00	75.544.250	76,32%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.800.000,00	18.237.000	87,68%
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	20.800.000,00	18.237.000	87,68%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	417.078.000,00	368.886.264	88,45%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	98.000.000,00	86.044.553	87,80%
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	319.078.000,00	282.841.711	88,64%
	Rata-rata Capaian Kegiatan		84,15%
	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan		85,11%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.805.208.000,00	2.428.555.223	86,57%
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.720.000,00	28.277.000	86,42%
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	32.720.000,00	28.277.000	86,42%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	2.772.488.000,00	2.400.278.223	86,57%

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.772.488.000,00	2.400.278.223	86,57%
	Rata-rata Capaian Kegiatan		86,50%
	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan		86,50%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	0,00%
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00%
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0,00%
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0,00%
	Rata-rata Capaian Kegiatan		0,00%
	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan		0,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	477.010.000,00	455.827.150	95,56%
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	319.994.000,00	302.032.650	94,39%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	151.492.000,00	149.098.500	98,42%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	168.502.000,00	152.934.150	90,76%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	157.016.000,00	153.794.500	97,95%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.016.000,00	153.794.500	97,95%
	Rata-rata Capaian Kegiatan		96,17%
	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan		95,71%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.061.185.412,00	1.010.771.845	95,25%

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	135.909.600,00	130.877.600	96,30%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	135.909.600,00	130.877.600	96,30%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	925.275.812,00	879.894.245	95,10%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	304.570.100,00	283.067.995	92,94%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	322.817.000,00	313.040.000	96,97%
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	193.303.712,00	180.881.750	93,57%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	104.585.000,00	102.904.500	98,39%
	Rata-rata Capaian Kegiatan		95,70%
	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan		95,64%
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	394.180.751,00	335.148.118	85,02%
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	62.647.500,00	59.517.950	95,00%
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	62.647.500,00	59.517.950	95,00%
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	331.533.251,00	275.630.168	83,14%
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	85.610.000,00	80.560.192	94,10%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	42.333.925	65,94%

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	107.400.000,00	80.800.000	75,23%
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	30.000.000,00	27.741.800	92,47%
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	44.323.251,00	44.194.251	99,71%
	Rata-rata Capaian Kegiatan		89,07%
	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan		87,08%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.675.353.712,00	1.391.884.825	83,08%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	622.700.000,00	529.821.475	85,08%
Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	192.980.000,00	155.350.164	80,50%
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	24.671.663	98,69%
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	126.970.000,00	126.182.548	99,38%
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	65.000.000,00	57.480.000	88,43%
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	132.750.000,00	110.445.000	83,20%
Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	55.692.100	69,62%
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	120.000.000,00	120.000.000	100,00%
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	6.000.000,00	6.000.000	100,00%
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	114.000.000,00	114.000.000	100,00%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	743.378.000,00	558.953.678	75,19%
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.700.000,00	-	0,00%
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	655.778.000,00	535.701.678,00	81,69%

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30.900.000,00	23.252.000	75,25%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	189.275.712,00	183.109.672	96,74%
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	87.275.712,00	87.169.692	99,88%
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	8.951.500	99,46%
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	93.000.000,00	86.988.480	93,54%
	Rata-rata Capaian Kegiatan		89,25%
	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan		83,54%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.963.133.537,00	7.288.026.730	91,52%
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.413.133.537,00	5.151.729.366	95,17%
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	362.040.000,00	353.180.000	97,55%
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	321.900.000,00	306.261.012	95,14%
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.133.980.000,00	3.995.200.622	96,64%
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	595.213.537,00	497.087.732	83,51%

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.550.000.000,00	2.136.297.364	83,78%
Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.592.000.000,00	1.353.427.664	85,01%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	958.000.000,00	782.869.700	81,72%
	Rata-rata Capaian Kegiatan		89,47%
	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan		89,93%
Total capaian Program	68.946.994.211,00	50.567.636.778,00	73,34%
Predikat kinerja kegiatan			78,38%
Predikat kinerja sub-kegiatan			77,00%

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada tahun anggaran tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.15.439.173.008,00 dengan realisasi kinerja 100%. Penyelenggaraan program ini berhasil mencapai kinerja yang sangat positif dalam mendukung Indikator Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Pencapaian kinerja sebesar 106,25% pada Indikator Nilai SAKIP menunjukkan bahwa program ini berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah. Meskipun capaian anggaran sebesar Rp.12.994.608.381,00 atau 84,17% menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran guna mendukung pencapaian kinerja yang lebih optimal di masa

yang akan datang. Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap realisasi anggaran untuk memahami faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi capaian tersebut. Langkah-langkah perbaikan atau penyesuaian strategi dapat diimplementasikan agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih besar sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan dalam Indikator Nilai SAKIP.

Program pemberdayaan sosial mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.905.149.767,00 dengan realisasi kinerja 100%. Program ini dirancang untuk mendukung ketercapaian Indikator persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang berhasil mencapai tingkat kemandirian atau terentaskan sebesar 15,37%. Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja indikator tersebut sebesar Rp.3.791.179.736,00. Meskipun program berhasil mencapai indikator kinerja sebesar 100% dengan capaian anggaran sebesar 97,08% namun telah menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi mendalam terhadap realisasi anggaran dapat membantu mengidentifikasi area di mana pengelolaan anggaran dapat dioptimalkan. Langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian strategi dapat diambil untuk memastikan bahwa sumber daya finansial yang diberikan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Dengan demikian, program pemberdayaan sosial dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan mencapai tujuan utama program.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mendapatkan anggaran sebesar Rp.371.772.924,00 dengan realisasi kinerja 100%. Dimana dalam pelaksanaannya program ini juga mendukung ketercapaian Indikator persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri yang memiliki capaian kinerja 29,84%. Realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung capaian kinerja indikator tersebut adalah sebesar Rp.267.589.065 atau 71,98%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi mendalam terhadap realisasi anggaran dapat membantu mengidentifikasi area di mana pengelolaan anggaran dapat dioptimalkan. Langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian strategi

dapat diambil untuk memastikan bahwa sumber daya finansial yang diberikan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Dengan demikian, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dapat memberikan kontribusi maksimal, tidak hanya dalam pengelolaan taman makam pahlawan tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Program Rehabilitasi Sosial mendapatkan anggaran sebesar Rp.16.940.991.800,00 dengan realisasi kinerja 141,73%. Program ini berfokus pada rehabilitasi sosial dan mendukung ketercapaian Indikator Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina dengan capaian kinerja mencapai 20,72%. Meskipun kurang berhasil mencapai tujuan tersebut, realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp.8.409.609.826,00 atau 49,64% memberikan ruang untuk peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan program. Evaluasi mendalam terhadap realisasi anggaran dapat membantu mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif di masa mendatang.

Program Penanganan Bencana mendapatkan anggaran sebesar Rp.282.165.000,00 dengan realisasi kinerja 100%. Meskipun program ini berhasil mencapai kinerja 100% dalam menangani dan membina Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp.224.562.565,00 atau 79,59%. Evaluasi realisasi anggaran ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi sumber daya keuangan agar program tetap efektif dalam penanganan bencana dan pemberdayaan PMKS di masa yang akan datang.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mendapatkan anggaran sebesar Rp.17.094.802.300,00 dengan realisasi kinerja 26,70%. Program ini bertujuan untuk mendukung ketercapaian Indikator Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, dengan capaian kinerja sebesar 142,59%. Meskipun berhasil melebihi target kinerja yang ditetapkan namun realisasi anggaran yang digunakan hanya Rp.11.507.205.800 atau 67,31%. Evaluasi mendalam terhadap realisasi anggaran ini diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi hambatan serta meningkatkan efisiensi dalam mendukung jaminan sosial bagi kelompok yang dituju.

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mendapatkan anggaran sebesar Rp.536.868.000,00 dengan realisasi kinerja 103,63%. Program ini berfokus pada dukungan terhadap ketercapaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan capaian kinerja mencapai 99,71%. Namun realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp.462.667.514,00 atau 86,18%. Evaluasi lebih lanjut terhadap realisasi anggaran diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian anggaran serta untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam mendukung program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga mendapatkan anggaran sebesar Rp.2.805.208.000,00 dengan realisasi kinerja yang sangat bagus yaitu 1673%. Program ini bertujuan mendukung ketercapaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan capaian kinerja mencapai 99,71%. Realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp.2.428.555.223,00 atau 86,57%. Evaluasi yang mendalam terhadap realisasi anggaran diperlukan untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian anggaran serta untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam mendukung peningkatan kualitas keluarga.

Program Perlindungan Perempuan mendapatkan anggaran sebesar Rp.477.010.000,00 dengan realisasi kinerja 100%. Program ini fokus pada mendukung ketercapaian Indikator Ratio KDRT dengan capaian kinerja mencapai 132,06%. Realisasi anggaran yang digunakan hanya sebesar Rp.455.827.150 atau 95,56%. Evaluasi lebih lanjut terhadap realisasi anggaran diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian anggaran dan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam mendukung perlindungan perempuan.

Program Perlindungan Khusus Anak mendapatkan anggaran sebesar Rp.1.061.185.412,00 dengan realisasi kinerja 100%. Program ini tidak hanya berhasil mendukung ketercapaian Indikator Ratio KDRT dengan capaian kinerja 132,06%. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.1.010.771.845,00 atau 95,25%. Keseluruhan program ini mencerminkan efektivitas dalam perlindungan khusus anak dengan

optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan. Evaluasi lebih lanjut dapat memberikan wawasan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja program di masa mendatang.

Program Pengendalian Penduduk mendapatkan anggaran sebesar Rp.394.180.751,00 dengan realisasi kinerja 105,29%. Program ini berhasil mendukung ketercapaian Indikator TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) dengan capaian kinerja 105,29%. Meskipun berhasil mencapai tujuan tersebut, realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp.335.148.118,00 atau 85,02%. Evaluasi lebih lanjut terhadap realisasi anggaran diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian anggaran dan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam mendukung program pengendalian penduduk.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) mendapatkan anggaran sebesar Rp.1.675.353.712,00 dengan realisasi kinerja 100,50%. Program ini berhasil mendukung ketercapaian Indikator TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) dengan capaian kinerja 105,29%. Meskipun berhasil mencapai tujuan tersebut realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp.1.391.884.825,00 atau 83,08%. Evaluasi lebih lanjut terhadap realisasi anggaran diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian anggaran dan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam mendukung program pembinaan keluarga berencana.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) mendapatkan anggaran sejumlah Rp.7.963.133.537,00 dengan realisasi kinerja 100,63% dan 97,55% . Program ini berhasil mendukung ketercapaian Indikator TFR per WUS (15 s/d 49 tahun) dengan capaian kinerja 105,29%. Selain itu program ini juga berhasil meningkatkan persentase keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan Tribina sebesar 100,63% Meskipun telah mencapai target realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp.7.288.026.730,00 atau 91,52%. Evaluasi lebih lanjut terhadap realisasi anggaran diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian anggaran dan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam mendukung program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

Berdasarkan uraian diatas anggaran belanja langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 sebesar Rp.68,946,994,211.00 realisasi Rp.50,567,636,778.00 atau sebesar 73,34% dari total anggaran yang dialokasikan. Evaluasi terhadap penyerapan anggaran dapat menjadi dasar untuk perbaikan strategi pengelolaan keuangan di masa yang akan datang. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi, ketercapaian tujuan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

BAB IV PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang Tahun 2023 telah menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target kinerjanya. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan terutama dalam hal peningkatan kualitas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan mental serta penanganan PMKS lainnya.

Dengan upaya-upaya yang telah direncanakan diharapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dapat meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Malang. Pada Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan sebanyak 4 sasaran dan 10 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Pencapaian Tujuan 1**

Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator Persentase Penurunan PMKS. Pada tahun 2023 capaian kinerja indikator ini yaitu 274,98% dengan target 5% realisasi kinerja 13,75%. Dari hasil ini capaian sudah

melebihi target dari hasil proses pemutakhiran data PMKS Kota Malang serta adanya perluasan intervensi penanganan PMKS oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan stakeholder dan mitra terkait. Jumlah PMKS pada tahun 2023 sebanyak 108.277 jiwa sehingga diperlukan optimalisasi sinergitas antar perangkat daerah dalam sistem pendataan yang valid, terpilah, dan berkala sehingga dapat melakukan penanganan kemiskinan secara umum pada segala jenis PMKS dengan tepat sasaran.

- Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan bagi PMKS dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terentaskan/mandiri pada tahun 2023, capaian kinerja indikator ini 36,20% dari target 15,37% realisasi kinerja 5,56% yang berarti bahwa tidak tercapai indikator kinerjanya dikarenakan dari jumlah PMKS 108.277 jiwa yang dinyatakan tidak layak atau terentaskan 6.025 jiwa karena kurangnya kesadaran masyarakat yang sudah mampu untuk menyatakan diri tidak layak sehingga perlu peran aktif petugas. Dan masih diperlukan adanya tambahan anggaran untuk kegiatan pelatihan dan pemberdayaan PMKS sehingga bisa memberikan ketrampilan usaha untuk meningkatkan motivasi mandiri bagi PMKS yang telah terlatih.
- 2) Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina pada tahun 2023, capaian kinerja indikator ini 46,57% dari target 79,94% realisasi kinerja 37,23% yang berarti belum mencapai target yang ditetapkan dan masih diperlukan adanya sinergitas antar perangkat daerah dalam penanganan PMKS. Dari jumlah PMKS 108.277 jiwa yang ditangani dan dibina baru 40.312 jiwa sehingga masih diperlukan perluasan pembinaan kepada PMKS. Dan adanya

kegiatan yang belum mencapai tingkat optimalisasinya perlu penyesuaian jadwal pelaksanaan sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan bisa maksimal dan berdampak positif terhadap PMKS yang menjadi fokus perhatian.

- 3) Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah Menerima Jaminan Sosial pada tahun 2023 memiliki kenaikan signifikan dengan capaian kinerja indikator 142,59% dari target 66,61% realisasi kinerja 94,98% yang berarti tercapainya indikator kinerja dan jauh dari target yang telah ditetapkan. Dari jumlah PBID 126.057 jiwa yang termasuk lansia dan disabilitas ada 119.731 jiwa. Keberhasilan mencapai target kinerja ini karena kesesuaian data antara jumlah penerima dan target yang ditetapkan. Oleh karena itu perlu dipertahankan dan diperlukan pendataan ulang secara terpilah, valid, dan berkala, terutama pada sistem pendataan penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia). Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendukung peningkatan capaian kinerja untuk memberikan jaminan sosial kepada kelompok yang membutuhkan.

- **Pencapaian Tujuan 2**

Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Capaian indikator kinerja 99,52% dari target yang ditetapkan 96% realisasi kinerja 95,54%. Mesti belum bisa mencapai target yang ditentukan namun langkah positif menuju terwujudnya kesetaraan gender terus dilakukan. Kurangnya peran aktif organisasi perempuan dan pemberdayaan kualitas keluarga perempuan. Koordinasi dan kerjasama dengan BPS dan Dispendukcapil perlu terus dijalin agar data dan informasi yang digunakan untuk mengukur IPG akurat dan dapat dipercaya. Penguatan kolaborasi diharapkan dapat membawa perubahan positif sehingga capaian IPG dapat sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga kesetaraan gender dapat terwujud secara optimal.

- Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki indikator kinerja :

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2023 capaian kinerja indikator ini 99,71% dari target 79% realisasi kinerja 78,77% yang berarti tidak tercapai indikator kinerja dari target yang telah ditetapkan maka perlu ditingkatkan upaya kinerja khususnya pada program peningkatan kualitas keluarga. Kurangnya partisipasi aktif perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial sehingga perlu diambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan capaian kinerja seperti memperkuat strategi dan implementasi program peningkatan kualitas keluarga. Kerjasama antar berbagai pihak dalam pelaksanaan program, evaluasi rutin terhadap program sehingga dapat membantu mengidentifikasi hal-hal yang perlu perbaikan. Dengan meningkatkan fokus dan efektivitas program peningkatan kualitas keluarga, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Ratio KDRT pada tahun 2023 capaian kinerja indikator ini 132,06% dari target 1:27500 realisasi kinerja 1:36317 berarti sudah tercapai target yang ditetapkan. Ketercapaian target dikarenakan adanya keberhasilan dalam memberikan sosialisasi dan penanganan kasus yang bagus sampai pendampingan selesai. Untuk memastikan keberlanjutan indikator ini diperlukan upaya untuk tetap menjaga dan memperkuat implementasi kebijakan serta program-program yang bisa mengurangi kasus KDRT. Langkah-langkah preventif dan intervensi yang efektif yang telah diterapkan perlu diperkuat dan dilakukan pemantauan serta evaluasi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Penguatan kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah dan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bisa mengurangi kasus korban KDRT.

- Pencapaian Tujuan 3

Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk. Capaian indikator kinerja 19,05% dari target yang ditetapkan 0.63% realisasi kinerja 0.12%, menunjukkan bahwa capaian kinerja jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Perlu penguatan KIE melalui media cetak dan media elektronik dan strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengelola pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Serta diperlukan penguatan program keluarga berencana, peningkatan kesadaran masyarakat dan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah-langkah perbaikan yang diambil haruslah holistik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja laju pertumbuhan penduduk sesuai target pada masa mendatang. Ditambah lagi ini merupakan indikator negatif yang semakin kecil prosentase semakin bagus namun hal ini juga mengimplikasikan bahwa perencanaan target yang kurang optimal.

- Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga dengan indikator TFR per WUS (15 s/d 49 tahun). Capaian indikator kinerja 105,29% dari target yang ditetapkan 1,7 realisasi kinerja 1,79% menunjukkan bahwa kinerja tercapai namun masih tetap perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti program KB Pemerintah melalui Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Langkah-langkah untuk meningkatkan sosialisasi dilakukan dengan memperluas informasi, edukasi dan komunikasi yang lebih intensif. Melibatkan pihak-pihak yang relevan seperti petugas kesehatan, kelompok masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya keluarga berencana. Penguatan kerjasama antara pemerintah, lembaga kesehatan dan masyarakat dapat

menjadi kunci dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat mencapai sasaran dengan baik. Dengan mempertahankan upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan keberlanjutan dalam mencapai tujuan pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Serta ditambah lagi ini merupakan indikator negatif yang semakin kecil prosentase semakin bagus namun hal ini juga mengimplikasikan bahwa perencanaan target yang kurang optimal.

- Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP. Capaian indikator kinerja 106,25 dari target yang ditetapkan 80,80 realisasi kinerja 85,85 menunjukkan bahwa capaian indikator tercapai dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan lagi. Penting untuk terus mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan baik dari segi efisiensi, responsivitas, maupun kualitas layanan. Memperkuat sistem pengukuran kinerja dan evaluasi yang transparan dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat memberikan umpan balik yang berharga untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan responsivitas perangkat daerah. Dengan mempertahankan komitmen terhadap peningkatan kinerja, diharapkan Kota Malang dapat terus meningkatkan Nilai SAKIP dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DAK, dan DBHCHT sebesar Rp.68.946.994.211,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp.50.567.636.778,00 atau serapan anggaran sebesar 73,34% dan telah menunjukkan nilai efisiensi anggaran sebesar 26,66% atau Rp. 18.379.357.433,00.

memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dinas. Laporan ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait termasuk para stakeholders dan pihak yang berpartisipasi aktif dan diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun kepercayaan, memotivasi perbaikan, dan memastikan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan Kota Malang.

Malang, 13 Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNAGN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA



DONNY SANDITO W, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770724 199602 1 001

LAMPIRAN

1. Matrik Renstra 2018-2023

TABEL 2.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal (2018)	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase (%) Penurunan PMKS	-2,23%	5%	5%	5%	5%	5%
	Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terlentaskan/mandiri	4,38%	15,10%	15,11%	15,46%	15,15%	15,37%
		Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilangan/dibina	71,48%	73,16%	79,16%	78,40%	79,52%	79,94%
		Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	38,88%	38,88%	61,98%	63,62%	65,06%	66,61%
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Serta Meningkatkan Kemampuan Fungsionalnya	NA	14,06%	14,14%	14,21%	14,26%	14,26%
		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	NA	38,14%	61,24%	73,68%	74,00%	74,50%
		Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	NA	10,53%	13,76%	100%	100%	100%
		Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal (2018)	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	6	7	8
Terwujudnya Kesetaraan Gender dan perlindungan Perempuan dan Anak dan Berbagai Tindak Kekerasan		IPG	94.71	95.80	96.90	95	95.5	96
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak	IDG	71.05	74.84	74.87	76.3	76.6	79
		Persentase Organisasi Perempuan Yang Aktif	93%	93%	93%	96.5%	96.5%	96.5%
		Persentase Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan peningkatan kualitas keluarga	NA	-	-	0.02%	0.06%	0.06%
		Persentase Perangkat daerah yang menempatkan Anggaran Responsif Gender (ARG)	63	63	75	85	100	100
		Rato KDRT	1:3175	1:3171	1:3398	1:27000	1:27250	1:27500
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	-	-	-
		Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	NA	-	-	100%	100%	100%
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	NA	-	-	100%	100%	100%
	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas		Laju Pertumbuhan Penduduk	0.63	0.63	0.62	0.65	0.64
Meningkatnya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		TRF per WUS (15 s/d 49 tahun)	1.7	1.85	1.87	1.7	1.7	1.7
		Cakupan peserta KB Aktif	75	76.2	76.4	75.6	76	75.5
		Persentase kelompok UPPKS Aktif	94.5	94.55	94.84	94.74	92.90	92.75
		Persentase keluarga kelompok kegiatan Tribina aktif	67	67	67.5	68	66	65.5

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal (2018)	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	6	7	8
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	75,03	79	80	80,7	80,75	80,8

Malang, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERBENDONGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



DONNY ANITO W. S.STP, M.Si
Pangkat I
NIP. 19770724 199602 1 001

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. PENNY INDRIANI, MM
 Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI
 Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 2 Januari 2023



Drs. H. SUTIAJI

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

Dra. PENNY INDRIANI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630420 198903 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina	70,94%
		Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri	15,37%
		Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	66,61%
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak	IDG	79
		Ratio KDRT	1 : 27500
3	Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	1,7
4	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	80,8

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	15.167.188.875.00	APBD/APBN
2. Program Pemberdayaan Sosial	Rp	3.436.708.000.00	APBD/APBN
3. Program Rehabilitasi Sosial	Rp	17.377.887.900.00	APBD/APBN
4. Program Partisipasi dan Jaminan Sosial	Rp	16.000.188.888.00	APBD/APBN
5. Program Penanganan Bencana	Rp	254.520.000.00	APBD/APBN
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	271.772.924.00	APBD/APBN
7. Program Pengarusutamaan Gender Dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	451.068.000.00	APBD/APBN
8. Program Perlindungan Perempuan	Rp	436.710.000.00	APBD/APBN
9. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	2.302.474.000.00	APBD/APBN
10. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	99.000.000.00	APBD/APBN
11. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	1.130.660.412.00	APBD/APBN
12. Program Pengendalian Penduduk	Rp	406.000.000.00	APBD/APBN
13. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	1.687.268.000.00	APBD/APBN
14. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	7.652.800.000.00	APBD/APBN
	Rp	67.747.994.211.00	

Malang, 2 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA**



Drs. PENNY INDRIANI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630420 198903 2 014



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONNY SANDITO W, S.STP, M.Si
 Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, MM
 Jabatan : Pj. WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 29 September 2023


 WALIKOTA MALANG,
 Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, MM

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA,


 DONNY SANDITO W, S.STP, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770724 199602 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani/dibina	79,94%
		Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) binaan yang terentaskan/mandiri	15,37%
		Persentase (%) Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	66,61%
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan perempuan dan anak	IDG	79
		Rasio KNRT	1 : 27500
3	Meningkatnya pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	TFR per WUS (15 s/d 49 tahun)	1,7
4	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	80,8

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.439.173.008,00	APBD/APBN
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 3.905.149.767,00	APBD/APBN
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 16.940.991.800,00	APBD/APBN
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 17.094.802.300,00	APBD/APBN
5.	Program Penanganan Bencana	Rp 282.165.000,00	APBD/APBN
6.	Program Pengelolaan Teras Makam Pahlawan	Rp 371.772.924,00	APBD/APBN
7.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 536.868.000,00	APBD/APBN
8.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 477.010.000,00	APBD/APBN
9.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 2.805.208.000,00	APBD/APBN
10.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 1.061.185.412,00	APBD/APBN
11.	Program Pengendalian Penduduk	Rp 394.180.751,00	APBD/APBN
12.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 1.675.353.712,00	APBD/APBN

Program	Anggaran	Keterangan
13 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 7.953.133.537,00	APBD/APBN
JUMLAH	Rp 68.946.994.211,00	

Malang, 29 September 2023



KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

DONNY SANDITO W, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770724 199602 1 001

3. Ringkasan Pengukuran Kinerja yang sesuai IKU

PERSENTASE PENURUNAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
TAHUN 2023

NO	JENIS PMKS	PMKS 2022	PMKS 2023	KETERANGAN
1	ANAK BALITA TERLANTAR	6	39	
2	ANAK TERLANTAR	9	30	
3	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	24	39	
4	ANAK JALANAN	7	9	
5	ANAK DENGAN KECACATAN	443	690	
6	ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN	84	26	
7	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	24	31	
8	LANJUT USIA TERLANTAR	37	412	
9	PENYANDANG DISABILITAS	1951	2014	
10	TUNA SUSILA	8	6	
11	GELANDANGAN	16	94	
12	PENGEMIS	9	49	
13	PEMULUNG	1	10	
14	KELOMPOK MINORITAS	0	0	
15	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	194	0	
16	ORANG DENGAN HIV/AIDS	0	0	
17	PENYALAHGUNAAN NAPZA	12	0	
18	KORBAN TRAFIKING	0	2	
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN	24	33	
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	0	0	
21	KORBAN BENCANA ALAM	345	156	
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	54	196	
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	81	100	
24	KELUARGA FAKIR MISKIN	122198	104339	
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	10	2	
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	0	0	
	JUMLAH	125537	108.277	

Realisasi Penurunan PMKS

(125537-108277)/125537*100%

13,75%

Target

5,00%

Capaian

274,98%

Malang, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERTUNJUKAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA


DONNY SANDITO W. S.STP, M.SI
 Pembina Tingkat I
 NIP: 19770724 199602 1 001

PROSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG DITANGANI/DIBINA
TAHUN 2023

NO	JENIS PMKS	JUMLAH	YANG DITANGANI /DIBINA	KETERANGAN
1	ANAK BALITA TERLANTAR	39	39	
2	ANAK TERLANTAR	30	30	
3	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	39	39	
4	ANAK JALANAN	9	9	
5	ANAK DENGAN KECACATAN	690	690	
6	ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN	26	26	
7	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	31	31	
8	LANJUT USIA TERLANTAR	412	412	
9	PENYANDANG DISABILITAS	2014	2014	
10	TUNA SUSILA	6	6	
11	GELANDANGAN	94	94	
12	PENGEMIS	49	49	
13	PEMULUNG	10	10	
14	KELOMPOK MINORITAS	0	0	
15	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	0	0	
16	ORANG DENGAN HIV/AIDS	0	0	
17	PENYALAHGUNAAN NAPZA	0	0	
18	KORBAN TRAFIKING	2	2	
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN	33	33	
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	0	0	
21	KORBAN BENCANA ALAM	156	156	
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	196	196	
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	100	100	
24	KELUARGA FAKIR MISKIN	104339	36374	
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	2	2	
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	0	0	
	JUMLAH	108277	40312	

Realisasi PMKS yang ditangani/dibina	37,23%
Target	79,94%
Capaian	46,57%

Malang, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



**PMKS YANG TERENTASKAN /MANDIRI
TAHUN 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH	TIDAK LAYAK
1	BPNT	19.806	929
2	BPNTD	7.000	196
3	PKH	10.292	232
4	PBI	130.092	4.668
			6.025
Jumlah PMKS		108277	
Realisasi		5,56	
Target		15,37	
Capaian		36,20%	

Malang, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



DONNY SANDITO W, S.STP, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19770724 199602 1 001

PERSENTASE PENYANDANG cacat fisik mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial tahun 2023

REKAP JUMLAH PENDUDUK				
NO	USIA	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	60	4,306	4,958	9,264
2	61	4,209	4,840	9,049
3	62	3,659	4,020	7,679
4	63	4,105	4,735	8,840
5	64	3,878	4,351	8,229
6	65	3,354	3,803	7,157
7	66	3,127	3,619	6,746
8	67	2,929	3,151	6,080
9	68	2,776	3,173	5,949
10	69	2,765	2,917	5,682
11	70	2,108	2,417	4,525
12	71	2,052	2,426	4,478
13	72	1,676	1,992	3,668
14	73	1,761	2,179	3,940
15	74	1,403	1,845	3,248
16	75	1,276	1,488	2,764
17	76	1,019	1,361	2,380
18	77	824	1,225	2,049
19	78	951	1,470	2,421
20	79	693	1,006	1,699
21	80	638	943	1,581
22	81	901	1,135	2,036
23	82	418	572	990
24	83	568	833	1,401
25	84	391	603	994
Jumlah		51,787	61,062	112,849

NO	USIA	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
26	85	289	495	784
27	86	219	389	608
28	87	168	375	543
29	88	150	381	531
30	89	118	249	367
31	90	82	192	274
32	91	78	192	270
33	92	46	105	151
34	93	65	168	233
35	94	38	69	107
36	95	30	67	97
37	96	17	32	49
38	97	11	24	35
39	98	10	34	44
40	99	6	21	27
41	100	5	11	16
42	101	3	10	13
43	102	3	5	8
44	103	2	7	9
45	104	1	2	3
46	105	1	2	3
Jumlah		1342	2830	4172

NO	USIA	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
47	106	0	0	0
48	107	0	2	2
49	108	0	0	0
50	109	0	0	0
51	110	0	0	0
52	111	0	2	2
53	112	0	0	0
54	113	0	1	1
55	114	0	0	0
56	115	0	0	0
57	116	0	0	0
58	117	0	0	0
59	118	0	0	0
60	119	0	1	1
Jumlah		0	6	6

Anak dengan kedisabilitas	690
Penyangg Disabilitas	2014
Lansia	117027
Jumlah	119731
PBID	126057
Realisasi	94.98%
Target	66.61%
Capaian	142.59%

Malang, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA


DONNY SANDITO W., S.STP, M.Si
Pangkat Tingkat I
NIP. 19770724 199602 1 001

2022

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN KOMPONEN PEMBENTUKNYA
MENURUT KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR TAHUN 2022

No	Kab/Kota	IPG	Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)		Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		IPM Terpilah	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pacitan	85.65	70.47	74.37	12.90	12.53	8.09	7.39	14,211	6,062	74.52	63.83
2	Ponorogo	93.96	71.20	75.05	13.63	13.76	8.09	7.45	13,448	9,637	75.13	70.59
3	Trenggalek	92.41	72.31	76.05	12.50	12.53	8.19	7.59	15,156	9,658	75.67	69.93
4	Tulungagung	95.63	72.61	76.34	13.32	13.83	8.86	8.40	13,942	10,627	76.80	73.44
5	Blitar	93.22	72.01	75.79	12.35	13.03	7.92	7.68	16,273	9,696	75.64	70.51
6	Kediri	92.85	70.93	74.79	13.43	13.69	8.61	7.84	16,697	10,699	77.50	71.96
7	Malang	88.35	70.92	74.80	13.39	13.25	7.92	7.42	15,414	7,343	75.81	66.98
8	Lumajang	88.77	68.54	72.56	12.12	12.01	7.41	6.42	14,547	7,667	72.04	63.95
9	Jember	85.31	67.58	71.62	13.64	13.42	7.19	5.99	15,127	6,429	73.34	62.57
10	Banyuwangi	87.26	68.94	73.04	12.90	13.22	8.09	7.08	19,462	8,098	76.61	66.85
11	Bondowoso	91.10	65.18	69.22	13.55	13.31	6.84	5.58	14,943	9,684	71.49	65.13
12	Situbondo	87.32	67.55	71.53	13.50	13.16	7.35	5.98	15,854	7,873	73.81	64.45
13	Probolinggo	86.02	65.70	69.76	12.76	12.43	6.80	5.56	17,701	7,734	72.27	62.17
14	Pasuruan	91.02	68.49	72.49	12.76	12.84	8.10	6.92	14,589	8,964	73.69	67.07
15	Sidoarjo	94.68	72.40	76.16	14.85	15.08	10.97	10.56	20,613	14,211	84.64	80.14
16	Mojokerto	91.37	70.90	74.78	13.03	12.96	9.52	8.46	18,693	11,192	79.27	72.43
17	Joelang	90.51	70.85	74.71	13.36	13.85	9.25	8.22	16,858	9,103	78.30	70.87
18	Nganjuk	93.89	69.90	73.84	13.02	13.72	8.61	7.72	17,717	11,795	77.09	72.38
19	Madiun	92.14	69.88	73.79	13.00	13.69	8.46	7.53	16,557	9,836	76.25	70.26
20	Magetan	93.88	70.95	74.86	14.17	14.04	9.09	8.23	16,070	11,711	78.56	73.75
21	Ngawi	92.53	70.82	74.65	12.69	13.48	8.17	7.19	16,106	9,892	75.72	70.06
22	Bojonegoro	90.63	70.15	74.04	12.64	12.95	8.02	6.95	15,140	8,693	74.58	67.59
23	Tuban	88.39	69.94	73.87	12.24	12.44	7.82	6.94	16,596	7,873	74.58	65.92
24	Lamongan	89.50	70.86	74.71	13.65	14.13	8.85	7.88	17,379	8,625	78.39	70.16
25	Gresik	90.78	70.95	74.86	13.99	13.96	10.04	9.46	20,346	10,670	81.74	74.20
26	Bangkalan	87.35	68.45	72.46	12.13	11.80	6.73	5.36	13,322	7,048	70.28	61.39
27	Sampang	86.79	66.26	70.35	12.47	12.22	5.56	4.63	13,707	6,552	68.27	59.25
28	Pamekasan	86.83	65.91	70.01	13.91	13.52	7.67	6.15	13,136	6,699	72.13	62.63
29	Sumenep	81.88	69.96	73.85	13.63	13.29	6.92	5.18	14,303	5,367	73.60	60.26
30	Kota Kediri	94.53	72.35	76.18	15.27	15.53	11.15	9.90	16,339	12,437	83.00	78.46
31	Kota Blitar	97.37	72.31	76.06	14.47	14.78	10.98	10.55	15,414	13,520	81.42	79.28
32	Kota Malang	95.54	71.72	75.61	15.94	15.75	11.29	10.56	20,943	16,612	85.89	82.06
33	Kota Probolinggo	96.24	68.56	72.61	13.93	13.67	9.99	8.73	12,985	12,180	76.16	73.30
34	Kota Pasuruan	96.74	69.91	73.83	13.62	13.85	10.18	9.07	14,460	13,197	77.81	75.27
35	Kota Mojokerto	93.63	71.72	75.58	14.31	14.02	11.43	10.31	18,637	13,534	83.35	78.04
36	Kota Madiun	94.57	71.15	75.02	14.37	14.87	12.08	11.23	23,068	15,830	85.87	81.21
37	Kota Surabaya	94.21	72.50	76.26	15.10	14.67	11.04	10.16	22,435	16,584	85.81	80.84
38	Kota Batu	90.10	70.95	74.86	14.47	14.40	9.91	9.41	19,180	9,629	81.54	73.47
	Jawa Timur	92.08	69.81	73.71	13.26	13.59	8.42	7.65	17,226	10,292	76.81	70.73
	Indonesia	91.63	69.93	73.83	12.96	13.28	8.99	8.39	16,215	9,281	76.73	70.31

Sumber : bps.go.id

Badan Pusat Statistik, 2023

Target 96%
 Realisasi 95.54%
 Capaian 99.52%



REALISASI INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
TAHUN 2023

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	2021	2022
	JAWA TIMUR	72.36	74.42
1	PACITAN	70.45	68.12
2	PONOROGO	67.63	67.69
3	TRENGGALEK	61.43	62.15
4	TULUNGAGUNG	65.06	69.66
5	BLITAR	79.68	81.92
6	KEDIRI	71.64	73.20
7	MALANG	76.69	76.38
8	LUMAJANG	59.38	59.61
9	JEMBER	66.16	68.69
10	BANYUWANGI	74.84	74.57
11	BONDOWOSO	65.35	67.87
12	SITUBONDO	73.60	74.77
13	PROBOLINGGO	68.75	68.36
14	PASURUAN	65.75	67.12
15	SIDOARJO	67.10	67.34
16	MOJOKERTO	80.20	80.59
17	JOMBANG	73.76	72.24
18	NGANJUK	69.78	70.87
19	MADIUN	68.97	70.23
20	MAGETAN	70.50	71.45
21	NGAWI	71.33	74.49
22	BOJONEGORO	56.14	56.80
23	TUBAN	63.51	65.03
24	LAMONGAN	74.05	75.49
25	GRESIK	71.48	70.13
26	BANGKALAN	60.03	61.86
27	SAMPANG	55.67	50.18
28	PAMEKASAN	52.44	55.54
29	SUMENEP	61.79	60.81
30	KOTA KEDIRI	84.17	85.03
31	KOTA BLITAR	68.60	68.61
32	KOTA MALANG	77.63	78.77
33	KOTA PROBOLINGGO	65.05	65.81
34	KOTA PASURUAN	54.94	54.80
35	KOTA MOJOKERTO	70.68	72.34
36	KOTA MADIUN	76.75	78.03
37	KOTA SURABAYA	82.82	83.20
38	KOTA BATU	68.80	67.83

Target : 79
 Realisasi : 78.77
 Capaian : 99,71%

Malang, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELDARGA BERENCANA



REALISASI RATIO KDRT TAHUN 2023

No	Kecamatan	Kelurahan	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL	KEPALA KELUARGA	WAJIB KTP	SUDAH REKAM	% PEREKAMAN
			L	P					
A BLIMBING									
1		BALEARJOSARI	4,587	4,506	9,093	2,941	6,835	6,724	98.38%
2		ARJOSARI	5,128	5,213	10,341	3,310	7,652	7,516	98.22%
3		PURWODADI	9,553	9,814	19,367	6,398	14,702	14,409	98.01%
4		POLOWIJEN	6,079	6,150	12,229	3,944	9,260	9,101	98.28%
5		BLIMBING	4,169	4,273	8,442	2,873	6,508	6,391	98.20%
6		PANDANWANGI	16,664	16,722	33,386	10,535	24,827	24,352	98.09%
7		PURWANTORO	13,807	14,292	28,099	9,233	21,675	21,255	98.06%
8		BUNULREJO	12,795	13,207	26,002	8,721	20,109	19,774	98.33%
9		KESATRIAN	5,698	5,462	11,160	3,801	8,250	8,114	98.35%
10		POLEHAN	9,472	9,389	18,861	6,137	14,311	13,992	97.77%
11		JODIPAN	6,196	6,029	12,225	3,941	9,166	8,930	97.43%
				95,057	189,205	61,834	143,295	140,558	98.09%

No	Kecamatan	Kelurahan	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL	KEPALA KELUARGA	WAJIB KTP	SUDAH REKAM	% PEREKAMAN
			L	P					
B KLOJEN									
1		KLOJEN	2,699	2,955	5,654	1,928	4,327	4,246	98.13%
2		RAMPELCELAKET	2,781	2,955	5,736	2,012	4,522	4,457	98.56%
3		SAMAAN	5,091	5,270	10,361	3,512	7,987	7,819	97.90%
4		KIDULDALEM	2,988	3,047	6,035	2,033	4,617	4,521	97.92%
5		SUKOHARJO	4,251	4,439	8,690	2,920	6,695	6,545	97.77%
6		KASIN	6,047	6,373	12,420	4,227	9,740	9,564	98.19%
7		KAUMAN	4,304	4,512	8,816	2,992	6,768	6,629	97.95%
8		ORO ORO DOWO	4,931	5,188	10,119	3,529	7,958	7,817	98.23%
9		BARENG	7,104	7,543	14,647	4,942	11,330	11,125	98.19%
10		GADINGKASRI	4,023	4,154	8,177	2,767	6,245	6,159	98.62%
11		PENANGGUNGAN	4,654	4,849	9,503	3,165	7,254	7,145	98.50%
				51,285	100,158	34,027	77,443	76,028	98.17%

No	Kecamatan	Kelurahan	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL	KEPALA KELUARGA	WAJIB KTP	SUDAH REKAM	% PEREKAMAN
			L	P					
C KEDUNGKANDANG									
1		KOTALAMA	15,684	15,070	30,754	9,588	22,425	21,664	96.61%
2		MERGOSONO	9,353	9,112	18,465	6,054	13,808	13,470	97.55%
3		BUMIAYU	10,272	10,246	20,518	6,247	14,775	14,477	97.98%
4		WONOKOYO	3,738	3,621	7,359	2,425	5,419	5,314	98.06%
5		BURING	8,052	7,922	15,974	5,013	11,450	11,211	97.91%
6		KEDUNGKANDANG	5,876	5,800	11,676	3,768	8,574	8,414	98.13%
7		LESANPURO	10,341	10,331	20,672	6,651	15,570	15,211	97.69%
8		SAWOJAJAR	13,351	13,887	27,238	8,762	20,947	20,591	98.30%
9		MADYOPURO	11,135	11,230	22,365	7,048	16,733	16,461	98.37%
10		CEMOROKANDANG	7,256	7,223	14,479	4,565	10,744	10,533	98.04%
11		ARJOWINANGUN	5,905	5,947	11,852	3,631	8,620	8,444	97.96%
12		TLOGOWARU	3,535	3,427	6,962	5,119	5,119	5,034	98.34%
				103,816	208,314	68,871	154,184	150,824	97.82%

No	Kecamatan	Kelurahan	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL	KEPALA KELUARGA	WAJIB KTP	SUDAH REKAM	% PEREKAMAN
			L	P					
D SUKUN									
1		CIPTOMULYO	6,634	6,606	13,240	4,447	9,882	9,652	97.67%
2		GADANG	10,158	10,077	20,235	6,545	15,111	14,708	97.33%
3		KEBONSARI	5,213	5,310	10,523	3,324	7,783	7,607	97.74%
4		BANDUNGREJOSARI	15,712	15,793	31,505	10,072	23,782	23,333	98.11%
5		SUKUN	9,412	9,668	19,080	6,343	14,586	14,253	97.72%
6		TANJUNGREJO	14,380	14,215	28,595	9,476	21,579	21,092	97.74%
7		PISANGCANDI	7,174	7,275	14,449	4,798	11,270	11,064	98.17%
8		BANDULAN	8,753	8,775	17,528	5,636	13,071	12,809	98.00%
9		KARANGBESUKI	9,682	9,804	19,486	6,331	14,850	14,629	98.51%
10		MULYOREJO	8,582	8,326	16,908	5,332	12,470	12,241	98.16%
11		BAKALANKRAJAN	5,192	4,992	10,184	3,226	7,419	7,293	98.30%
				100,841	201,733	65,530	151,803	148,681	97.94%

No	Kecamatan	Kelurahan	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL	KEPALA KELUARGA	WAJIB KTP	SUDAH REKAM	% PEREKAMAN
			L	P					
1	LOWOKWARU	TUNGGULWULUNG	4,627	4,709	9,336	2,897	6,972	6,858	98.36%
2		MERJOSARI	8,519	8,576	17,095	5,283	12,601	12,403	98.43%
3		TLOGOMAS	7,082	7,230	14,312	4,604	10,790	10,582	98.07%
4		DINOYO	5,578	5,733	11,311	3,679	8,535	8,389	98.29%
5		SUMBERSARI	3,915	4,120	8,035	2,662	6,024	5,917	98.22%
6		KETAWANGGEDE	2,527	2,574	5,101	1,666	3,872	3,801	98.17%
7		JATIMULYO	9,593	9,834	19,427	6,195	14,733	14,475	98.25%
8		TUNJUNGSEKAR	8,721	8,741	17,462	5,505	13,062	12,828	98.21%
9		MOJOLANGU	10,982	11,271	22,253	7,217	16,889	16,630	98.47%
10		TULUSREJO	8,193	8,477	16,670	5,485	12,646	12,436	98.34%
11		LOWOKWARU	9,210	9,720	18,930	6,409	14,819	14,528	98.04%
12		TASIKMADU	3,883	3,817	7,700	2,433	5,605	5,499	98.11%
				84,802	167,632	54,035	126,548	124,346	98.26%
		Jumlah Total		435,801	867,042				

TOTAL KK 284,297
TOTAL KDRT 12
RATIO KDRT 0.04221
REALISASI 1 : 36317
Target 1:27500
Capaian 132.06%

PENDUDUK PEREMPUAN 435,801
REALISASI KDRT 36,317

Malang, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



REALISASI LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TAHUN 2023

The screenshot shows the website of the Badan Pusat Statistik Kota Malang. The main content area displays a table titled 'Indikator Demografi' with columns for the years 2021, 2022, and 2023. The table lists four indicators: Kepadatan Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, and Rasio Ketergantungan. The data shows a population density of 7,677.00 in 2021 and 7,617.00 in 2022, with a growth rate of 0.13 in 2021 and 0.12 in 2022. The gender ratio is 98.02 in 2021 and 98.94 in 2022, and the dependency ratio is 42.75 in 2021 and 43.02 in 2022.

Indikator Demografi	2021	2022	2023
Kepadatan Penduduk	7.677,00	7.617,00	7.621,00
Pertumbuhan Penduduk	0,13	0,14	0,12
Rasio Jenis Kelamin	98,02	98,98	98,94
Rasio Ketergantungan	42,75	43,02	43,26

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (Metode Exponensial) Formula : $1/\text{Rentang Tahun} \times \ln Pt/P0 \times 100$		
2022	P0	846126
2023	Pt	847182
	Pt/P0	1,001248041
1/Rentang Tahun		1
Ln Pt/P0		0,001247
1/Rentang Tahun x Ln Pt/P0		0,001247
1/Rentang Tahun x Ln Pt/P0 x 100		0,124726

Target 0,63
 Realisasi 0,12
 Capaian 19,05%

Malang, Januari 2024
 KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA

DONNY SANDITO W, S.STP, M.SI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770724 199602 1 001

TOTAL FERTILITY RATE (TFR) 2023			
Formula : $5 \times \left(\frac{\text{Jumlah Kelahiran}}{\text{Jumlah Perempuan}} \right) / 1000$			
Kelompok Umur	Jumlah Perempuan	Jumlah Kelahiran*	ASFR
1	2	3	4= $\frac{3}{2} \times 1000$
15-19	30.021	1.200	39,97
20-24	31.924	1.930	60,46
25-29	32.581	2.030	62,31
30-34	32.805	1.961	59,78
35-39	32.671	1.730	52,95
40-44	31.565	1.430	45,30
45-49	29.532	1.079	36,54
	221.099	11.360	357

$$\begin{aligned} \text{TFR} &= 5 \times \left[\frac{40 \ 60 \ 62 \ 60 \ 53 \ 45 \ 37}{5} \right] \\ &= 1.787 \text{ per 1000 perempuan 15-49 tahun} \\ &= \underline{\underline{1,79}} \end{aligned}$$

Sumber :Jumlah Kelahiran : *Malang Dalam Angka 2023 (Tabel 4.2.7 Hal. 159)*Jumlah Perempuan Kelompok Umur : *Malang Dalam Angka 2023 (Tabel 3.1.2 Hal. 47)*

Malang, Januari 2024


 KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG
BONNY SANDITO W., S.STP., M.Si
 Kepala Dinas Tingkat I
 NIP. 19770724 199602 1 001



PEMERINTAH KOTA MALANG
INSPEKTORAT DAERAH
 Jl. Gajahmada No. 2A Telp / Fax. (0341) 364450 Kode Pos. 65119
MALANG

BERITA ACARA
HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Senin tanggal 19 Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan klarifikasi terhadap hasil Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang. Adapun hasil Evaluasi SAKIP diperoleh Total Nilai sebesar **85,85 (Nilai A)** dengan rincian nilai tiap komponen sebagai berikut :

1. Komponen Perencanaan Kinerja dengan nilai **27,6** dari bobot **30**
2. Komponen Pengukuran Kinerja dengan nilai **27,00** dari bobot **30**
3. Komponen Pelaporan Kinerja dengan nilai **11,25** dari bobot **15**
4. Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai **20,00** dari bobot **25**

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP tersebut di atas maka ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam dokumen SAKIP maupun implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Dilakukan pengarsipan dokumen Akuntabilitas Kinerja Internal DinsosP3AP2KB secara berkala minimal selama 5 tahun berturut-turut;
2. Menciptakan inovasi dalam kaitannya untuk meningkatkan kinerja DinsosP3AP2KB;
3. Melakukan publikasi dokumen perencanaan di website DinsosP3AP2KB secara berkala dan tepat waktu;
4. Meningkatkan capaian kinerja di tahun berjalan dan tahun berikutnya;
5. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun berjalan maupun pada tahun berikutnya.

Evaluator :

1. Revina Anisandra, SE : 
2. Sasanti Rahmawardhani, SE, M.Si : 

Perangkat Daerah :

1. **DONNY SANDITO W.** : 
2. **JEDY SOEMADHA** : 

4. Rekap Penghargaan 2023

PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	JENIS PENGHARGAAN	KATEGORI	TINGKAT	TANGGAL DITERIMA	BUKTI DUKUNG
1	Kota Layak Anak Tahun 2023	Nindya	Nasional	22 Juli 2023	
2	Forum Anak Kota Malang Penerima Dana Award Tahun 2023	Website Terbaik	Nasional	22 Juli 2023	
3	Atmaja Award Tahun 2023 Forum Anak Kota Malang	Media Sosial Terbaik	Provinsi	November 2023	

4	Juara III Pemilihan Kampung Keluarga Berencana	Pengembangan Pengelolaan Kampung KB Tingkat Kota Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	Provinsi	28 Juli 2023	
5	Perempuan Inspiratif di Bidang Pertanian	Bidang Pertanian	Nasional	17 Mei 2023	

Malang, 1 Desember 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA**



5. SPM

Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) 2023

No	INDIKATOR	KOTA MALANG			KABUPATEN MALANG			KABUPATEN BOJONEGORO		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	REKTORAT	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	KODIKAT	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	KELOMPOK USAHA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	PERUMAHAN BERKUALITAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	TRANSIBERKUALITAS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	SIKAP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TINDAK KEBERSIHAN APLIKASI										
	Kebersihan Aplikasi	100,00%	100,00%	100,00%						
	Kebersihan Aplikasi	100,00%	100,00%	100,00%						
	Kebersihan Aplikasi	100,00%	100,00%	100,00%						

Capaian 100,00%

Malang, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PENGENDALIAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



DONNY SARDIYO W, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770724 199602 1 001

6. LHE SAKIP 2023

**FORM EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHE SAKIP
TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PELAKSANAAN		DOKUMEN PENDUKUNG	
			SUDAH	BELUM	ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kedepannya untuk dapat tertib dalam pengarsipan dokumen Akuntabilitas Kinerja Internal Dinsos P3AP2KB Kota Malang minimal 5 Tahun ke belakang.	Memperhatikan tertib arsip dokumen Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas.	√		√	
2.	Mendokumentasikan semua kegiatan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.	Dinas Sosial P3AP2KB telah melaksanakan monitoring dan evaluasi.	√			√
3.	Mengidentifikasi dokumen Akuntabilitas Kinerja Internal Dinsos P3AP2KB Kota Malang yang diperlukan untuk dipublikasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dinas Sosial P3AP2KB telah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.	√		√	
4.	Meningkatkan capaian kinerja di tahun berjalan dan tahun berikutnya.	Melaksanakan kinerja sesuai dengan perencanaan dan target.	√		√	
5.	Mengimplementasikan seluruh komponen Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinsos P3AP2KB Kota Malang untuk mencapai tujuan yang diharapkan.	Mengimplementasikan komponen Akuntabilitas Kinerja Internal.	√		√	

Malang, 08 Juni 2023

KEPALA DINAS SOSIAL P3AP2KB



DONNY ANDITO W., S.STP.M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19770724 199602 1 001